



K S H M



BADAN POM

2024

LAPORAN

TAHUNAN

**Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2024 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) periode 2020 – 2024. Tahun ini penuh tantangan dan peluang bagi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan program strategis guna memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak serta meningkatkan komunikasi dan citra BPOM. Dalam laporan ini, kami memaparkan capaian, kendala, serta evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan agar dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang diraih tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik dari internal BPOM maupun mitra eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun ini.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi landasan dalam merancang langkah-langkah strategis di masa yang akan datang terutama di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat. Semoga Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.



Jakarta, 27 Maret 2025
Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat,



Lynda K. Wardhani



K S H M



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
HIGHLIGHT KEGIATAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	49
1.1. Gambaran Umum Instansi.....	49
1.1.1. Visi dan Misi.....	49
1.1.2. Tujuan	49
1.1.3. Tugas dan Fungsi	50
1.1.4. Budaya Organisasi.....	50
1.1.5. Struktur Organisasi.....	53
1.2. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator	53
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	56
2.1. Sumber Daya Manusia	56
2.1.1. Data Kepegawaian	56
2.1.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM).....	58
2.1.3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).....	59
2.2. Sarana dan Prasarana	61
2.3. Anggaran	61
BAB III HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	63
3.1. Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	63
3.1.1 IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.....	63
3.1.2 IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	70
3.2. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	92
3.2.1 IKK 3: Indeks kepuasan media	92
3.2.2 IKK 4: Indeks Opini Publik	97
3.2.3 IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	100
3.3. Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	102
3.4. Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	105
3.5. Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	107
3.5.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	107

3.5.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	112
3.5.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai <i>agenda setting</i>	114
3.6. Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	115
3.6.1. IKK 11: Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	116
3.6.2. IKK 12: Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Kerja Sama dan Humas	129
3.7. Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	131
3.7.1. IKK 13: Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	131
3.8. Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	134
3.8.1 IKK 14: Indeks pengelolaan data dan informasi	134
3.9. Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	136
3.9.1. IKK 15: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas .	136
BAB IV PENUTUP	138
4.1. Kesimpulan	138
4.2. Saran	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Core Value BERAKHLAK	51
Gambar 2 Budaya Kerja PIKKIR	52
<i>Gambar 3</i> Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	53
Gambar 4 Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.....	54
Gambar 5 Data Pegawai Berdasarkan Usia	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	54
Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	57
Tabel 4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja	58
Tabel 5. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	61

HIGHLIGHT KEGIATAN

JANUARI

Diskusi dengan Pakar Eksternal Untuk Tingkatkan *Media Engagement*



Media massa memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi dan kebijakan strategis seputar pengawasan obat dan makanan. Strategi kolaborasi dan kerja sama dengan media massa perlu dikembangkan dengan tepat melalui diskusi dengan pakar eksternal yang dilakukan pada Senin (22/01/2024).

“Media bukan mesin distribusi siaran pers. Jadi, harus dibangun relasi humanistik yang berkelanjutan dengan media, mulai dari hulunya,” pesan Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers Asmono Wikan dalam diskusi tersebut.

Pemberitaan dari media tidak selalu positif, namun pemberitaan negatif juga tidak selalu buruk. Bisa juga karena mediana belum kenal siapa dan apa tupoksi kita. “Ini bisa jadi bahan evaluasi bagi Humas,” ujar CEO Center for Public Relations, Outreach, and Communication (CPROCUM) Emilia Bassar.

Selain diskusi dengan pakar, *sharing session* dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang diwakili oleh Baharuddin Robbani, juga berbagi pengalaman dalam menjalankan program kehumasan serta membangun *engagement* dengan media massa. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan *insight* dalam menyusun program kehumasan BPOM yang lebih efektif ke depannya.

Kerja sama BPOM dan USP: Memperkuat Standar Mutu Produk Farmasi melalui Peningkatan Kapasitas Regulatori BPOM



Plt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia menerima kunjungan CEO USP, Ronald T. Piervincenzi, (25/1/2024). Pertemuan membahas kolaborasi antara BPOM dan USP dalam memperkuat rantai pasok produk medis melalui standar mutu.

USP adalah organisasi nirlaba berbasis ilmu pengetahuan yang berkantor pusat di Amerika Serikat

(AS). Mereka mengembangkan standar kualitas obat-obatan, suplemen makanan, dan bahan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat global. Standar USP digunakan di lebih dari 175 negara dan diacu oleh USFDA untuk obat-obatan yang diimpor atau dipasarkan di AS.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai rencana kolaborasi dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kegiatan kerja sama ke depan. USP siap membantu peningkatan kapasitas pegawai BPOM, termasuk pengembangan baku pembandingan dan digitalisasi laboratorium. Mereka juga menawarkan akses gratis ke USP *online* untuk unit pusat dan laboratorium BPOM.



USP akan bekerja sama dengan BPOM untuk memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan, termasuk pengajuan WHO-Listed Authority (WLA). Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat standar kualitas dan meningkatkan layanan BPOM dalam pengawasan obat-obatan dan makanan.

Pertemuan BPOM dengan CoRE Duke-NUS dan Asian Development Bank

BPOM telah melakukan pertemuan dengan Centre of Regulatory Excellence (CoRE) Duke-NUS Singapura dan Asian Development Bank (ADB) di sela-sela kunjungan CoRE dan ADB dalam rangka peresmian *Vaccine Collaborating Centre (VOLARE)* yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta (26/1/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerja sama dan menajajki dukungan yang dapat diberikan oleh CoRE dan ADB terhadap peningkatan kapasitas regulatori BPOM.



Pertemuan dengan CoRE Duke-NUS dan ADB dipimpin oleh Plt. Kepala BPOM didampingi oleh Plt. Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA, Direktur Standardisasi ONPPZA, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kepala PPSDM, serta perwakilan dari unit kerja di Kedeputan 1, PPOMN, dan Pusakom. Hadir dari pihak CoRE yaitu Executive Director, Prof. John W. Lim beserta tim, dan dari ADB yaitu

Director of Human and Social Development Sector Office, Dr. Patrick Osewe dan Tim. Pada pertemuan tersebut, Plt. Kepala BPOM menyampaikan permohonan dukungan dari CoRE dan ADB, antara lain terkait: 1) Implementasi program WHO Listed Authority (WLA), termasuk pembentukan sekretariat dalam rangka persiapan pengajuan WLA; 2) *Grand Design* dan pengembangan infrastruktur laboratorium; dan 3) Penyusunan standar dan metode uji kualitas, terutama untuk ATMPs, seperti *cell therapy* dan *gene therapy*;

Selain itu, disampaikan juga mengenai pentingnya perencanaan jangka panjang dan pemberdayaan SDM yang fokus pada peta jalan yang jelas, strategi implementasi, dan pembangunan kapasitas. Selanjutnya dilakukan juga penajajkan potensi dukungan keuangan, termasuk kemungkinan pinjaman dari ADB dengan penekanan pada pendekatan kolaboratif antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan kapabilitas kesehatan Indonesia.



CoRE dan ADB menyampaikan beberapa hal terkait permohonan dari BPOM, antara lain: 1) BPOM perlu mengidentifikasi penentuan aspek yang mendesak dan area yang



K S H M



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

kritis dalam mewujudkan pengajuan WLA. Dalam hal ini, CoRE dan ADB menekankan agar BPOM dapat membagi proses menjadi beberapa tahapan dan dilanjutkan dengan rencana jangka panjang lainnya; 2) Sebelum dilakukan pertemuan antara BPOM dengan WHO untuk membahas WLA, CoRE dan ADB akan membantu BPOM untuk membuat panduan dan simulasi penilaian dalam rangka memperbaiki *gap* yang muncul dari hasil *self-assessment* yang telah dilakukan oleh BPOM; dan 3) CoRE dan ADB menyarankan kerja sama mengenai *grand design* laboratorium untuk dilaksanakan pada periode kerja sama berikutnya dengan menggabungkan keahlian *tech invention* serta teknologi manufaktur dan regulator.

BPOM juga menyampaikan bahwa draf MoU antara BPOM dan CoRE saat ini tengah dalam tahap *review* akhir dan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri, termasuk draf dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya draf dimaksud akan disampaikan kepada CoRE untuk *final review*.

FEBRUARI

Perundingan Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, BPOM prioritaskan aksesibilitas dan keterjangkauan obat dalam perlindungan kekayaan intelektual produk farmasi.

BPOM berpartisipasi aktif dalam perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU - CEPA) Working Group on Intellectual Property (WGIP)* putaran ke-16 pada 9–11 Januari 2024 di Brussels, Belgia dan putaran ke-17 pada 26 Februari–1 Maret 2024.

Perundingan IEU-CEPA merupakan upaya dari kedua belah pihak, Indonesia dan Uni Eropa (UE) untuk mencapai kemitraan ekonomi yang komprehensif serta meningkatkan akses pasar dan kerja sama ekonomi. *Working Group on Intellectual Property (WGIP)* adalah salah satu forum dalam perundingan IEU-CEPA yang bertujuan untuk memastikan perlindungan kekayaan intelektual dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi Indonesia dan Uni Eropa.



Pada perundingan putaran ke-16 dan ke-17, delegasi BPOM yang hadir meliputi Direktur Standardisasi Obat NPPZA dan tim, PFM Ahli Utama pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPPZA, perwakilan dari Direktorat Registrasi Obat, Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Sementara, pihak EU

terdiri dari Rocío Pérez Segura dan Stephan Hanne dari DG Trade, serta Markus Bonorianto dari perwakilan kantor EU Commission to Indonesia and Brunei Darussalam.

Topik perundingan terkait wewenang BPOM yang dibahas yaitu perlindungan data registrasi (*data protection*) pada artikel X.44 paragraf 1 dan 2. Posisi UE adalah menuntut perpanjangan masa perlindungan data hasil uji praklinik dan klinik obat baru. Dampak perpanjangan masa perlindungan data adalah semakin lamanya pasar eksklusif obat baru dan mengakibatkan terhambatnya pendaftaran obat generik untuk keterjangkauan harga obat di Indonesia.

Indonesia - UE telah melakukan diskusi untuk menghasilkan narasi perjanjian yang dapat dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sebelum perundingan ke-17 dimulai, UE mengusulkan narasi baru dimana usulan tersebut menyatakan bahwa masa perlindungan data dikembalikan kepada aturan yang berlaku di masing-masing negara dan hal ini dapat diterima oleh Indonesia.

Pada akhirnya, Indonesia dapat menerima usulan EU terkait masa perlindungan data yang disesuaikan dengan aturan masing-masing negara. Hal ini menegaskan komitmen sejati BPOM dalam memastikan aksesibilitas dan ketersediaan obat yang terjangkau bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ke depan, BPOM perlu mengantisipasi rencana revisi UU Paten yang terkait dengan PerBPOM No.24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.



MARET

Meet The Admins

Mengusung tema “Meracik Informasi, Menarik Atensi”, kegiatan *Meet the Admins* diadakan selama dua hari, 5–6 Maret 2024, untuk menjadi ajang berkumpulnya para admin media sosial dari seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM dalam rangka memperkuat sinergi, sekaligus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan media sosial. Hal ini penting untuk memperluas pengaruh positif media sosial yang dikelola BPOM terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan obat dan makanan.



Kegiatan hari pertama menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Farchan Noor Rachman dan Bagas Satria Pamungkas, yang memberikan sharing session terkait bagaimana membangun interaksi publik dengan konten pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan bahwa untuk membangun interaksi publik, kita harus bisa memosisikan akun media sosial pemerintah untuk kepentingan eksternal. Selain juga perlu didukung kemampuan untuk bisa menyajikan materi yang dibutuhkan oleh netizen dan dikemas secara kreatif, santai, dan tidak terlalu serius.



Selain itu, narasumber lain yang dihadirkan adalah Digital Creator dari Bali, Itakimo yang memberikan insight terkait *Be Creative, Outside The Box*. Itakimo menceritakan bahwa dalam sebuah tim kreatif, setiap personilnya harus berkembang bersama, jangan saling memanfaatkan satu sama lain.

Kegiatan hari kedua diisi dengan penyampaian materi dari tim pengelola media sosial official BPOM. Dalam kesempatan tersebut, tim pengelola media sosial official menyosialisasikan Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM yang dikeluarkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 432 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan.

APRIL

B POM kawal penguatan pengawasan obat melalui implementasi *Memorandum of Understanding (MoU)* bersama PMDA

Plt. Kepala BPOM berkunjung ke Jepang (22/4/2024). Kunjungan kerja ini bertujuan menghadiri dan mengikuti serangkaian pertemuan yang diadakan oleh *Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA)* sebagai bentuk peningkatan implementasi kerja sama antar kedua regulator pada bidang pengawasan obat.



Pertemuan berfokus pada pembahasan terkait peningkatan kolaborasi dalam *joint assessment* dan penguatan kapasitas regulasi pengawasan obat, khususnya terkait dengan mekanisme *reliance* antara negara anggota ASEAN dengan dukungan dari *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)* Jepang dan WHO. Mekanisme *reliance* ini akan memungkinkan penggunaan hasil evaluasi dari regulator negara referensi dalam mendukung proses pengambilan keputusan guna mempercepat ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat.



Selain itu, dilakukan pertemuan yang membahas kerja sama yang telah diformalisasi melalui *Memorandum of Cooperation* yang ditandatangani pada 27 Agustus 2021. Kerja sama tersebut meliputi pelatihan, berbagi informasi, dan penilaian obat baru melalui mekanisme *reliance*. Beberapa usulan kerja sama yang dibahas telah dimasukkan dalam *Action Plan 2024*

seperti *long-term trainees* pegawai BPOM di PMDA juga pelatihan yang diselenggarakan melalui PMDA-ATC dengan durasi pendek.

MEI

Kunjungan Kerja Plt. Kepala BPOM dan Delegasi ke Korea Selatan

Plt. Kepala BPOM melakukan Kunjungan Kerja ke Korea Selatan pada tanggal 12–14 Mei 2024. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menghadiri pertemuan *2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit* (APFRAS), melaksanakan pertemuan bilateral dengan *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS) dan melaksanakan kunjungan ke Daewoong Pharmaceutical yang fokus bergerak pada bidang manufaktur produk farmasi.

Menghadiri pertemuan *2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit*



Pertemuan berfokus pada isu-isu seperti standar keamanan pangan, *product labelling*, perlindungan konsumen, dan harmonisasi regulasi terkait pangan. Keanggotaan BPOM pada APFRAS bermanfaat, khususnya dalam mendalami isu-isu terbaru mengenai regulatori pangan termasuk menyampaikan posisi BPOM agar nantinya dapat sejalan dengan aturan maupun kesepakatan internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala BPOM mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan *statement* pada agenda *panel discussion*, bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab semua negara, dan BPOM sebagai instansi yang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan nilai gizi pangan olahan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi konsumen, mendorong praktik perdagangan yang adil, serta mendukung metode produksi pangan berkelanjutan.

Guna dukung kemudahan perizinan masuk produk makanan, pertemuan bilateral BPOM dan MFDS terlaksana



Pertemuan membahas mengenai pencabutan pemberlakuan kewajiban pengujian *Ethylene Oxide* untuk produk mi instan asal korea, akses percepatan pemasukan produk susu asal korea dan MRA saling pengakuan hasil inspeksi sarana produksi pangan antar kedua negara. BPOM akan menindaklanjuti beberapa hal, diantaranya: akan melakukan koordinasi dan diskusi teknis lebih lanjut dengan MFDS terkait *review* persyaratan *Ethylene Oxide* pada produk mi instan asal Korea; akan mempelajari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh EU terkait dengan pencabutan persyaratan sertifikat *Ethylene Oxide* pada mie instan Korea; dan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait penjadwalan inspeksi dalam rangka tahapan pemasukan produk susu Korea ke Indonesia.

Kunjungan ke Daewoong Pharmaceutical Co, Ltd



Plt. Kepala BPOM dan delegasi mengunjungi R&D Daewoong Pharmaceutical, perusahaan farmasi terdepan di Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1945. Kunjungan BPOM ke Daewoong Pharmaceutical merupakan langkah strategis untuk mendapatkan wawasan mengenai kemajuan dan inovasi yang dirintis Daewoong di bidang farmasi, termasuk upaya penelitian terkini, metodologi, dan rangkaian pengembangan produk yang dimiliki Daewoong, serta rencana Daewoong mengembangkan bisnis mereka di Indonesia termasuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi di Indonesia.

Dukungan BPOM pada Pelaksanaan 10th World Water Forum (WWF) di Bali pada tanggal 18 – 25 Mei 2024



Pertemuan 10th World Water Forum (WWF) telah dilaksanakan tanggal 18—25 Mei 2024 di Bali. Kepala BPOM bertindak sebagai Anggota Pengarah dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai Anggota Pelaksana Bidang VII Keamanan dan Kesehatan berdasarkan Kepmen Komarves No 53 Tahun 2024. Adapun Sekretaris Utama BPOM bertindak sebagai Anggota Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan berdasarkan Keppres No 13 Tahun 2024.

BPOM telah melaksanakan pengawalan keamanan pangan sebelum pelaksanaan kegiatan berupa *kitchen inspection* di hotel dan sarana penyedia pangan, pemeriksaan sarana peredaran sekitar *venue* acara dan stikerisasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran (SMKPO).

Dukung Perjuangan Palestina, BPOM Berikan Pelatihan Pengawasan Obat dan Makanan



Makanan

BPOM telah menyelenggarakan program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Palestina tahun 2024 di Amman, Yordania pada tanggal 20-23 Mei 2024. Program pelatihan ini diberikan kepada pejabat Kementerian Kesehatan Palestina dengan tujuan untuk meningkatkan

pengetahuan peserta dalam bidang pengawasan obat dan keamanan pangan dalam rangka pembentukan otoritas regulator obat dan makanan Palestina yang mandiri.

Pelatihan di Amman, Yordania dipilih dengan mempertimbangkan situasi keamanan Palestina. Sebanyak 15 peserta menempuh perjalanan darat dari kota Ramallah di Palestina melintasi perbatasan *Allenby Bridge* dan *King Hussein Bridge Border*. Peningkatan kapasitas bagi regulator Palestina ini sangat penting untuk memastikan pasokan obat dan makanan yang masuk ke Palestina tetap aman dan berkualitas.

Pelatihan dibuka oleh Plt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalucia yang menegaskan kembali janji Indonesia yang berkelanjutan dan teguh untuk mendukung perjuangan Palestina, khususnya di masa-masa sulit ini. “Saya ingin menekankan dukungan teguh FDA Indonesia terhadap peningkatan kapasitas Kementerian Kesehatan Negara Palestina, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan pada masa kritis ini,” jelasnya saat membuka pelatihan secara daring dari Jakarta, (21/05/2024).

Pelatihan juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya nyata BPOM membantu Palestina dan kesungguhan Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina hingga terpenuhinya hak-hak rakyat Palestina dan terwujudnya kemerdekaan Palestina. Indonesia juga teguh memberikan dukungan politik terhadap Palestina di forum dunia.



Program kerja sama ini terus bergulir intensif dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan. Pemerintah Palestina sangat menghargai peningkatan kapasitas yang diberikan oleh Indonesia melalui BPOM selama ini menunjukkan simbol persaudaraan dan dukungan penuh Indonesia untuk perjuangan pemerintah dan rakyat Palestina.

Direktur Registrasi Obat, Kementerian Kesehatan Palestina, Mustofa Alnadi mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Indonesia dalam pengawasan obat dan makanan yang independen bagi Palestina. Di sela-sela pelatihan dia menceritakan kondisi sulit Palestina saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di Palestina. Peserta kegiatan terbagi dalam dua kelas yakni pengawasan obat dan keamanan pangan. Para peserta terlihat antusias berdiskusi terkait *best practice* yang dilakukan BPOM. Kasus demi kasus ditanyakan untuk mencari solusi setiap permasalahan pengawasan obat dan makanan. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengawas obat dan makanan di Palestina, sekaligus mendorong pembentukan otoritas obat dan makanan Palestina yang independen.

Kerja sama BPOM untuk mendorong Pertumbuhan UMKM dengan Sistem Jemput Bola



Dalam rangka mendampingi pelaku UMKM agar dapat memenuhi semua standar keamanan dan mutu Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan Sarasehan UMKM Banyuwangi Rebound di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, (22/5/2024). Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM di Kabupaten Banyuwangi beserta daya saing produknya. Dalam hal ini, BPOM bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud komitmen bersama memajukan UMKM.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPOM dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan. Kerja sama ini merupakan langkah nyata kolaborasi pemerintah dalam mendorong UMKM agar dapat naik kelas agar mampu turut berkontribusi lebih besar bagi perekonomian melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

Selama ini BPOM melalui Balai POM di Jember (sebelumnya masih berstatus Loka POM) aktif memberikan layanan Sertifikasi Obat dan Makanan dan Layanan Konsultasi dan Informasi di MPP Banyuwangi sejak tanggal 18 September 2018. Pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan di loket BPOM sekaligus berkonsultasi dengan petugas BPOM apabila mengalami kesulitan dalam melakukan perizinan secara online.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM yang mengikuti bimbingan dan asistensi regulatori oleh tim dari BPOM dapat memanfaatkan momen kegiatan ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mampu menghasilkan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan berdaya saing tinggi.

Workshop Proses Akses Organisasi for Economic Cooperation and Development (OECD) Indonesia pada tanggal 29 Mei 2024



B POM telah mengikuti *Workshop* Proses Akses OECD Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD. Kegiatan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto dan Sekjen OECD, Mathias Cormann serta dihadiri oleh perwakilan Eselon I dan/atau yang mewakili dari K/L yang menangani substansi teknis dan hukum/legal termasuk B POM.

Workshop bertujuan untuk membahas proses akses keanggotaan Indonesia dan pelaksanaan Keppres Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dalam hal ini, B POM telah diusulkan sebagai salah satu Mitra Kerja Komite OECD, sehingga B POM perlu memulai untuk mengidentifikasi peraturan terkait tugas dan fungsi B POM sesuai standar maupun rekomendasi oleh *Committee on Consumer Policy*.



Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) tahun 2024 Wilayah 1



Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) tahun 2024 Wilayah 1 terselenggara di Depok pada tanggal 28—31 Mei 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan dari 6 (enam) unit kerja pusat dan 34 unit pelaksana teknis/UPT (Balai Besar/Balai/Loka POM).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Utama yang dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi potensi dengan memanfaatkan aset minimal



K S H M



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

untuk menghasilkan kinerja optimal dalam mengelola informasi. BPOM, dari pusat hingga daerah, bertanggung jawab menyampaikan informasi yang jelas, mudah diakses, dan akurat kepada masyarakat, serta menjawab pertanyaan dan kekhawatiran dengan cepat dan tepat. Keterbatasan tidak boleh menjadi penghalang, melainkan harus menjadi motivasi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Dalam *workshop* tersebut, materi pendalaman yang diberikan kepada peserta yaitu 1) Kerja Cepat Untuk Si Sapu Jagat (Eka Rosmalasari – Humas BPOM), 2) Fotografi Bukan Sekadar Cekrek (Mufid Muhammad Alfayid - Narabahasa), 3) Teknik Penulisan Berita (Ivan Razela Lanin - Narabahasa), dan 4) 1 Jam Kreatif: Membuat Konten Video (Reza Kumar – Inside Hira).

JUNI

Kunjungan Kerja Plt. Kepala BPOM dan Delegasi ke Republik Rakyat Tiongkok

Plt. Kepala BPOM beserta delegasi melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 26–29 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dan meningkatkan kualitas obat dan vaksin di Indonesia.

Kunjungan ke Tsinghua University

Kunjungan ini merupakan salah satu bagian dari upaya meningkatkan komitmen kolaborasi dengan Pusat Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomik Indonesia RRT (Indonesia-China Joint Development and Research Center on Vaccine and Genomics). Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia-China Joint Development and Research Center on Vaccine and Genomics (Tsinghua University) dan PT Increase Laboratorium Indonesia di bidang riset kolaboratif. Melalui kunjungan ini diharapkan ke depannya BPOM dapat menjajaki peluang dalam peningkatan kapasitas SDM BPOM melalui pendidikan formal (S2 dan S3) dan *short course* di Tsinghua University.



Kunjungan CanSino Biologics Inc.



Plt. Kepala BPOM mengunjungi CanSino Biologics Inc., perusahaan bioteknologi terkemuka di RRT. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama strategis dalam bidang pengembangan obat dan vaksin, khususnya terkait transfer teknologi dan peningkatan akses terhadap produk-produk berkualitas tinggi di Indonesia.

Kunjungan ke CanSino Biologics Inc. merupakan langkah penting dalam upaya BPOM untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap obat dan vaksin di Indonesia. Dengan kerja sama yang strategis, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan keahlian CanSino Biologics Inc untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

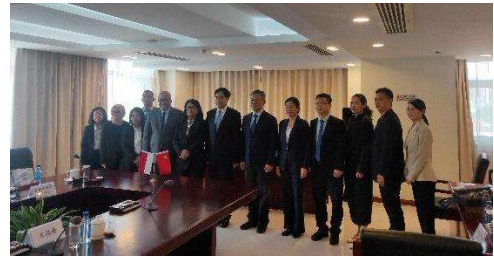


Kunjungan ke National Medical Products Agency (NMPA)



Plt. Kepala BPOM bertemu dengan Deputy XU Jinghe, Deputy Commissioner dari NMPA dan pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen kedua pihak dalam memperkuat kerjasama yang telah dimulai sejak penandatanganan MoU BPOM dengan NMPA pada tahun 2021. MoU tersebut berfokus pada harmonisasi regulasi obat dan kosmetik.

Pada pertemuan tersebut, Plt. Kepala BPOM mengusulkan beberapa kegiatan kerja sama konkrit untuk memperkuat regulasi dan pengawasan obat, seperti *on-the-job training*, *internship*, *joint assessment*, pengiriman staf BPOM ke NMPA untuk mempelajari pembuatan baku pembanding untuk pengujian obat dan bekerja sama untuk mengatasi peredaran obat palsu dan ilegal melalui penjualan obat secara daring. Selain itu, kedua pihak sepakat untuk menyusun *action plan* yang berisi rincian kegiatan kerja sama dan menetapkan *focal point* untuk implementasi kerja sama. Pertemuan BPOM dan NMPA merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat regulasi dan pengawasan obat. Dengan menjalin kolaborasi, BPOM dan NMPA dapat bersama-sama memastikan ketersediaan obat-obatan yang aman, efektif, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan RRT.



Kunjungan ke BeiGene

Plt. Kepala BPOM dan delegasi melakukan kunjungan ke BeiGene untuk meninjau fasilitas produksi dan membahas *roadmap* kolaborasi dalam pengembangan obat kanker. Fasilitas BeiGene yang modern dan canggih memungkinkan produksi obat-obatan berkualitas tinggi, seperti Tislelizumab dan Brukinsa. Obat-obatan ini terbukti efektif dalam pengobatan berbagai jenis kanker, seperti kanker paru-paru, karsinoma urotelial, dan limfoma. Kolaborasi antara BPOM dan BeiGene dengan Etana Biotechnologies membuka peluang baru untuk transfer teknologi PD-1. Transfer teknologi ini akan memungkinkan Etana untuk memproduksi obat kanker PD-1 secara lokal di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasien terhadap obat kanker yang berkualitas dan terjangkau.



Kunjungan ke Shanghai Henlius Biopharmaceutical Co. Ltd/ Fosun Pharma



Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas manufaktur dan membahas peluang kerja sama dalam pengembangan obat kanker. Henlius memiliki fasilitas manufaktur modern yang memproduksi obat-obatan berkualitas tinggi seperti Zerpidio dan Hertumab. Obat-obatan ini terbukti efektif dalam pengobatan kanker paru-paru dan kanker payudara. Kerja sama dengan Henlius diharapkan dapat mempercepat akses

pasien di Indonesia terhadap obat kanker yang inovatif dan terjangkau.

Kunjungan ke RNA Cure

Plt. Kepala BPOM dan delegasi mengunjungi RNA Cure, perusahaan yang berfokus pada pengembangan vaksin mRNA untuk hewan dan manusia. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas profil dan kemungkinan kerja sama dalam pengembangan vaksin. RNA Cure memiliki pengalaman kerja sama dengan berbagai institusi ternama, seperti Fudan University, Qvac, BioNTech, Rovax, dan Etana Indonesia. Kemampuan mereka untuk menyelesaikan pembuatan vaksin dalam 62 hari dengan mengubah antigen menjadikannya mitra potensial dalam pengembangan vaksin di Indonesia. Plt. Kepala BPOM menyambut baik kolaborasi internasional yang dilakukan RNA Cure dan mendorong mereka untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Indonesia. Plt Kepala BPOM mengharapkan Prof. Lin dapat berkunjung ke Indonesia untuk dapat memberikan sharing pengalaman terkait penelitian vaksin mRNA.



Melalui kegiatan kunjungan kerja ke RRT ini diharapkan dapat menunjukkan komitmen BPOM untuk meningkatkan kualitas dan akses obat kanker dan vaksin mRNA berkualitas dan terjangkau di Indonesia melalui kolaborasi dengan mitra internasional dalam pengembangan obat dan mendorong pengembangan industri farmasi di Indonesia.

Penyusunan Pedoman Hoaks Obat dan Makanan dengan Mafindo

Sejak tahun 2019 BPOM telah bekerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Kerja sama ini diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang “Kerja Sama dalam Penyebaran Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat Terkait Berita Hoaks di Bidang Obat dan Makanan”.

Pada tahun 2024, BPOM menyusun Pedoman Penanganan Hoaks Obat dan Makanan bersama Mafindo. Proses penyusunan ini dimulai dari Februari–Juni 2024 dengan melibatkan praktisi yang terjun di bidang penanganan hoaks.

Kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) keluaran, yaitu:

1. Dokumentasi terkait Hoaks Obat dan Makanan tahun 2015-2023;
2. Pedoman Penanganan Hoaks Obat dan Makanan;
3. Buku Saku terkait Pencegahan dan Penanganan Hoaks Obat dan Makanan; dan
4. Modul Edukasi untuk kegiatan KIE BPOM.



Hoaks vs Fakta Obat dan Makanan

Materi Penyuluhan Mengidentifikasi dan Melawan Hoaks

Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) tahun 2024 Wilayah 2



Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) tahun 2024 Wilayah 2 terselenggara di Yogyakarta pada 24—28 Juni 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 38 peserta yang merupakan perwakilan dari 16 unit kerja pusat dan 22 unit pelaksana teknis/UPT (Balai Besar/Balai/Loka POM).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Utama secara daring. Sestama menekankan pentingnya menyampaikan informasi obat dan makanan yang tepat, jelas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Memberikan informasi kepada publik menjadi tugas kehumasan yang diemban oleh seluruh pegawai BPOM. Untuk itu, alur kerja kehumasan juga harus diketahui oleh pegawai di unit kerja pusat dan di UPT.

Dalam workshop tersebut, materi pendalaman yang diberikan kepada peserta yaitu 1) Kerja Cepat Untuk Si Sapu Jagat (Gita Indah Nundy Sari – Humas BPOM), 2) Foto Jurnalistik, Komposisi dalam Fotografi, dan EDFAT (Andreas Fitri Atmoko – Pewarta Foto Indonesia), 3) Teknik Penulisan Berita (Ivan Razela Lanin – Narabahasa), dan 4) 1 Jam Kreatif: Membuat Konten Video (Reza Kumar – Inside Hira).

JULI

Kerja Sama BPOM dengan Kementerian Agama dalam rangka Pemanfaatan Daging Kurban Dam.



Dalam rangka memastikan daging olahan kurban dam sesuai dengan standar keamanan, BPOM melakukan audit pemeriksaan sarana produksi pangan olahan daging dam di Arab Saudi pada 1—6 Juli 2024. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari Kementerian Agama dan arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar dapat mengirimkan daging olahan kurban dam ke Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk penurunan stunting.

Pemeriksaan BPOM mencakup evaluasi dokumen, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), implementasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta evaluasi kecukupan panas untuk produk olahan daging dam yang di sterilisasi menggunakan *retort*. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan mutu produk olahan daging dam pasca waktu pengiriman yang panjang dan meminimalisir kesalahan *handling*, BPOM akan melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk setibanya di Indonesia. Sampling dan uji juga akan dilakukan secara gradual terhadap produk setelah beredar di lapangan.

Untuk kelancaran proses pemasukan produk ke Indonesia, diperlukan adanya koordinasi yang baik lebih lanjut dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) dan lintas instansi terkait, yaitu dengan Kementerian Pertanian, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, dan Kementerian Perdagangan. Hal ini demi mewujudkan maksud baik Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan secara optimal daging dam haji Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri.

BPOM, Kemenkes, BKKBN, dan BPJS Kesehatan Sepakati Integrasi Data Rantai Pasok Obat dengan KKSK



Dalam rangka meningkatkan komitmen Kementerian/Lembaga dalam Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan, Plt. Kepala BPOM L. Rizka Andalusia menandatangani Kesepakatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Kesepakatan ini merupakan upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian, lembaga dan pihak terkait. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memerintahkan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan untuk mengintegrasikan rencana, kebijakan dan melakukan monitoring serta melakukan evaluasi kebijakan.

BPOM telah melakukan proses integrasi rantai pasok obat sejak lama untuk data pemasukan obat yang berasal dari *platform* e-Was terkait pelaporan obat pada penyaluran (distribusi) dan penggunaan sebagai bentuk pengawasan menyeluruh terhadap pedagang besar farmasi, industri farmasi serta sarana pelayanan kefarmasian.

Forum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk memastikan ketersediaan dan distribusi obat yang lebih efisien dan transparan di Indonesia. Integrasi data obat nasional diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam pengelolaan stok obat, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi.

Keikutsertaan BPOM dalam Meeting of the Assembly of the Members of the South-East Asia Regulatory Network (SEARN)



Kegiatan *Meeting of the Assembly of the Members of the South-East Asia Regulatory Network (SEARN)* telah berlangsung dengan sukses pada tanggal 1 – 4 Juli 2024 di Dhaka, Bangladesh. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota SEARN, yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste. Selain itu, pertemuan ini juga melibatkan anggota *Coalition of Interested Parties (CIP) WHO*, di antaranya *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)*, *Medicines, Technologies, and Pharmaceutical Services (MTaPS)*, TGA, dan USP PQM+.

Pertemuan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk membahas sejumlah isu penting terkait penguatan regulasi kesehatan di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa agenda yang dibahas secara mendalam, di antaranya adalah *review progress SEARN 2023-2024 Work Plan*, yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja SEARN selama periode 2023-2024. Proses ini melibatkan pembahasan tentang pencapaian yang telah diraih berdasarkan *framework* monitoring dan evaluasi, serta membahas status *Global Benchmarking* masing-masing negara anggota. Selain itu, rencana kerja untuk periode berikutnya, SEARN 2024-2025, juga didiskusikan dan disepakati.

Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk melakukan diskusi dengan anggota CIP WHO, yang dihadiri oleh berbagai organisasi seperti CEPI, MTAps, TGA, dan USP PQM+. Mereka berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pertemuan SEARN, membawa perspektif baru dalam diskusi tentang kolaborasi internasional dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi tantangan kesehatan global.

Dengan berbagai pembahasan tersebut, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar negara anggota SEARN dan organisasi internasional dalam menghadapi tantangan regulasi kesehatan di kawasan Asia Tenggara.

AGUSTUS

Kerja sama BPOM dengan Kemenparekraf, KKP, dan PHRI untuk Mendukung Pengembangan Wisata *Wellness*



Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gaya hidup *wellness* serta beberapa produk kecantikan dan kebugaran yang terjamin keamanan dan mutu, BPOM menyelenggarakan Wellness Festival, (2/8/2024). Wellness Festival 2024 merupakan pusat komunitas *wellness* untuk produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam negeri yang aman, bermutu, serta berkhasiat dan berdaya saing unggul di pasar internasional dan global.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dengan Kemenparekraf tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mendukung program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Meet Market dan PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pengembangan bahan baku dan produk obat bahan alam dan kosmetik lokal berkualitas, khususnya yang berbasis kelautan dan perikanan.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif serta wisata *wellness* dan kampanye dalam mempromosikan Indonesia sebagai destinasi *wellness tourism*.

Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) tahun 2024 Wilayah 3



Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) tahun 2024 Wilayah 3 terselenggara di Ambon pada 26—30 Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 38 orang peserta dari 15 unit kerja pusat dan 18 unit pelaksana teknis/UPT (Balai Besar/Balai/Loka POM).

Dalam workshop tersebut, materi pendalaman yang diberikan kepada peserta yaitu 1) Kerja Cepat Untuk Si Sapu Jagat (Fathan Nur Hamidi – Humas BPOM), 2) Kita Berkomunikasi Hari Ini, dan Berkomunikasi Melalui Fotografi Jurnalistik (Beawiharta – Freelancer Photographer), 3) Teknik Penulisan Berita (Ivan Razela Lanin – Narabahasa), dan 4) 2 Jam Kreatif: Membuat Konten Video (Reza Kumar – Inside Hira).

SEPTEMBER

Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BPOM dengan Tanzania Medicines & Medical Devices Authority (TMDA)



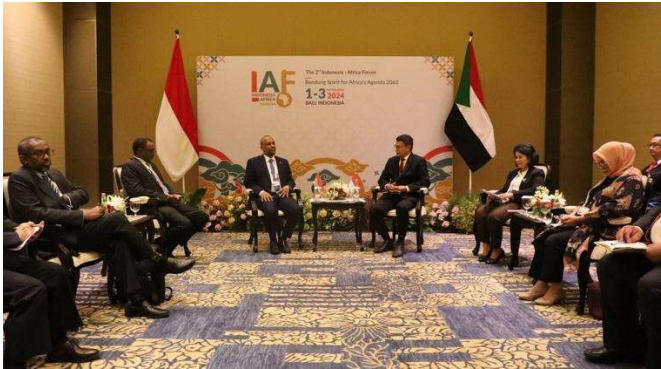
BPOM dan TMDA telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman/MoU bersama. MoU yang ditandatangani bertujuan untuk menyederhanakan proses regulasi bagi produk farmasi Indonesia yang ingin memasuki pasar Tanzania. Hal ini menandai pencapaian penting dalam upaya memperluas pasar farmasi Indonesia di Afrika.

Salah satu poin utama dalam MoU yang ditandatangani adalah BPOM mendorong implementasi *regulatory reliance* dengan TMDA. Dengan demikian, TMDA dapat mengandalkan hasil evaluasi obat dan inspeksi *Good Manufacturing Practice (GMP)* yang telah dilakukan oleh BPOM. Hal ini akan mempercepat proses registrasi dan perizinan produk farmasi Indonesia di Tanzania sehingga meningkatkan akses masyarakat Tanzania terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan.

Selain itu, TMDA Tanzania akan mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas regulasi dari BPOM untuk membangun sistem regulasi yang lebih kuat di negaranya. Kemitraan strategis ini merupakan hasil langsung dari kunjungan bilateral tingkat tinggi antara Indonesia dan Tanzania pada tahun 2023 dan 2024. Kedua negara menyatakan komitmen kuat untuk meningkatkan kerja sama di sektor farmasi dan kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPOM menyampaikan bahwa melalui kemitraan ini, BPOM dapat semakin memperkuat posisinya sebagai otoritas regulasi yang diakui secara internasional, tidak hanya membuka akses pasar bagi industri farmasi nasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat di Tanzania.

Pertemuan Bilateral Kepala BPOM dengan Sudan Minister of Health



Kepala BPOM telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesehatan Sudan, Haitham Mohamed Ibrahim Awadalla sebagai upaya mendukung Sudan yang tengah menghadapi krisis Kesehatan. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di sela-sela IAF II dan berhasil mencapai

kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama di sektor farmasi antara kedua negara.

Kepala BPOM telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesehatan Sudan, Haitham Mohamed Ibrahim Awadalla sebagai upaya mendukung Sudan yang tengah menghadapi krisis Kesehatan. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di sela-sela IAF II dan berhasil mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama di sektor farmasi antara kedua negara.



Sebagai sesama anggota *National Medicines Regulatory Authorities* (NMRAs) OIC, BPOM mendukung penuh Sudan melalui bantuan teknis penguatan kapasitas regulasi obat. Dukungan ini mencakup pelatihan dan transfer pengetahuan kepada otoritas regulatori Sudan. Kedua negara juga membahas potensi kerja sama dalam

evaluasi obat, inspeksi CPOB, dan pelepasan lot vaksin.

Regulator Sudan menyatakan kepercayaannya terhadap produk obat Indonesia dan berkomitmen mempercepat proses registrasi produk farmasi asal Indonesia, sehingga mempercepat akses ke pasar Sudan dan membuka peluang transfer pengetahuan. Kerja sama ini diharapkan memperkuat regulasi obat di Sudan dan membuka peluang pasar bagi industri farmasi Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan segera merumuskan dan menandatangani MoU yang mencakup pertukaran informasi standar dan regulasi, penerapan regulatory reliance, serta dukungan BPOM dalam capacity building untuk memperkuat kapasitas regulatori di Sudan.

Menghadiri 4th USP Asia Pacific (APAC) Convention Regional Chapter Meeting



Pertemuan *4th USP Asia Pacific (APAC) Convention Regional Chapter Meeting* pada tanggal 9 September 2024 berfokus pada isu-isu seperti strategi untuk meningkatkan integritas rantai pasok obat internasional, terutama pencegahan cemaran dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG) dalam sediaan farmasi, yang telah menimbulkan dampak negatif di berbagai negara. Sebagai pembicara kunci, Kepala BPOM menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menjaga mutu obat dan dampak buruk obat bermutu rendah terhadap kesehatan masyarakat. BPOM telah mengambil langkah konkret dalam menangani kasus cemaran EG dan DEG, termasuk memperketat pengawasan produksi serta distribusi, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, dan meningkatkan kapasitas laboratorium. BPOM juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan industri farmasi serta kerja sama internasional guna meningkatkan keamanan obat dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pertemuan Bilateral dengan United States Pharmacopeia (USP)



BPOM, dalam penyusunan Farmakope Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dengan mengacu pada standar internasional, termasuk United States Pharmacopeia (USP). Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu sediaan farmasi produksi Indonesia, sehingga produk-produk tersebut dapat diterima secara global, terutama untuk pasar ekspor.

Pada pertemuan tersebut, dibahas perkembangan penyusunan MoU antara BPOM dan USP yang diharapkan segera difinalisasikan. MoU ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan, *on-the-job training*, serta pemanfaatan standar farmakope untuk memperkuat pengawasan farmasi di Indonesia.

Joint Symposium dan Pertemuan Bilateral BPOM dengan Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea

Pada tanggal 11 September 2024, BPOM bekerja sama dengan Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea menyelenggarakan *Joint Symposium* serta pertemuan bilateral di Hotel Intercontinental, Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah ditandatangani oleh kedua lembaga pada tahun 2021. Acara ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang farmasi dan pengawasan obat.

Di samping pelaksanaan *Joint Symposium*, BPOM juga melakukan pertemuan bilateral dengan MFDS yang fokus membahas beberapa isu penting, antara lain:

1. Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan: BPOM mengajukan proposal terkait *benchmarking* di bidang WLA, investigasi kriminal terkait Obat dan Makanan, serta radiofarmaka;
2. Diskusi Pencabutan Pengujian *Ethylene Oxide (ETO)*: MFDS meminta pencabutan persyaratan sertifikat uji ETO untuk mie instan Korea yang diekspor ke Indonesia. BPOM berkomitmen untuk memberikan keputusan setelah melakukan verifikasi data di lapangan.
3. Penguatan Kerja Sama: MFDS menyampaikan undangan kepada BPOM untuk berpartisipasi dalam kegiatan *capacity building* terkait sistem keamanan pangan.



Melalui *Joint Symposium* dan pertemuan bilateral ini, BPOM dan MFDS berhasil memperkuat kerja sama strategis yang diharapkan akan berdampak positif dalam peningkatan kapasitas regulasi dan inovasi di kedua negara.

Penandatanganan MoU antara BPOM dan IPB

Dalam rangka penguatan fungsi analisis kebijakan dalam merespons tantangan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan “Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”. (23/9/2024). Analisis kebijakan Obat dan Makanan perlu didukung dengan penelitian atau riset yang memadai. Peran perguruan tinggi sangat krusial dalam melakukan riset menghasilkan inovasi baru untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.



Pada forum tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara BPOM dengan IPB University tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha

terutama UMKM, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat.

Selain itu, kerja sama juga diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan konsep analisis kebijakan BPOM 2025 serta dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi masalah kebijakan tantangan pengawasan obat dan makanan di masa depan.

OKTOBER

Penandatanganan *Grant Agreement (GA) Joint Work Plan (JWP) Biennium 2024–2025*

Pada saat penyelenggaraan Workshop Empowering Regulatory Excellence: Workshop on Advanced Therapy Medicinal Products (ELEVATE) di Jakarta, Senin (7/10/2024), BPOM bersama World Health Organization (WHO) *Country Office* Indonesia berkesempatan menandatangani dokumen kerja sama hibah periode 2024–2025, dalam rangka untuk peningkatan akses pada pengawasan obat dan makanan. Perjanjian ini mencakup kegiatan terperinci dari Rencana Kerja Bersama yang akan dilaksanakan BPOM dan WHO Indonesia untuk mendukung prioritas pembangunan Indonesia, khususnya kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Penandatanganan Nota Kesepahaman BPOM dan BPS, BKKBN, LAN, dan idEA



Dalam rangka sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, BPOM berkolaborasi dengan lintas sektor untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di seluruh lini, termasuk dalam perdagangan elektronik. Pada tanggal 9 Oktober 2024, BPOM menandatangani Nota

Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia E-commerce Association (idEA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Penandatanganan dilakukan pada acara Simposium Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan pada Rabu (9/10/2024). Dalam simposium tersebut, BPOM menekankan pentingnya jejaring laboratorium yang kuat di seluruh Indonesia untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat serta makanan.

BPOM mengakui bahwa pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Dengan semangat kolaborasi, BPOM berharap kegiatan ini dapat memfasilitasi diskusi produktif dalam memperkuat pengujian obat, terutama yang mendukung pengembangan ATMP, untuk mendukung pengawasan yang semakin efektif.



Penandatanganan Nota Kesepahaman BPOM dengan Bank Mandiri, PaDi UMKM, dan Evermos

BPOM berkolaborasi dengan PT Bank Mandiri Persero (Tbk.) menggelar forum bisnis dengan tema Perkuat Kapasitas dan Daya Saing Industri serta UMKM Obat dan Makanan Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2024. Forum bisnis ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kemitraan lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) obat dan makanan. Sekaligus meningkatkan literasi bisnis untuk pengembangan sektor usaha obat dan makanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemitraan lintas sektor ini diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Bank Mandiri dalam Mendukung Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPOM dengan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri. Selain itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Eksplorasi Kerja Sama Pemberdayaan dan Pengawasan UMKM di Bidang Obat dan Makanan, serta dengan *platform e-commerce* untuk UMKM tentang Pemberdayaan dan Pengawasan UMKM di Bidang Obat dan Makanan.

Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal BPOM bersama dengan lintas sektor terkait untuk mengawal tujuan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan dan kemandirian industri farmasi dan pangan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI terpilih, yang juga tertuang dalam program kerja pemerintahan baru (Asta Cita) serta 5 program prioritas Kepala BPOM, untuk memperkuat sektor farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Partisipasi BPOM pada Saudi International Halal Expo & Summit 2024

BPOM berpartisipasi dalam Saudi International Halal Expo & Summit 2024 yang berlangsung pada 28–30 Oktober 2024 di Riyadh International Convention & Exhibition Center. Dalam acara ini, BPOM membuka *desk* konsultasi terkait perizinan ekspor impor obat bahan alam dan pangan olahan, menarik minat pengunjung dari berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Kanada, Peru, dan lainnya. BPOM juga mendampingi tiga perusahaan terkurasi, yakni PT Maisya Makmur (obat bahan alam), PT Kosmetika Global Indonesia (kosmetik), dan PT Halalan Tayyiban (pangan olahan), serta memfasilitasi produk UMKM untuk turut dipamerkan. Hasilnya, perusahaan-perusahaan Indonesia berhasil menjalin koneksi bisnis dan memperoleh peluang ekspor ke berbagai negara, termasuk Mesir, Oman, Nigeria, dan Kenya.



Selain berpartisipasi dalam pameran, BPOM juga mengadakan pertemuan bilateral dengan SFDA untuk membahas kendala ekspor produk Indonesia, khususnya obat bahan alam dan pangan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah registrasi produk Tolak Angin dari PT Sido Muncul, yang sebelumnya terdaftar sebagai produk makanan tetapi harus memenuhi regulasi baru sebagai produk kesehatan. SFDA menyatakan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan sektor obat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan registrasi. BPOM diminta untuk menyampaikan data teknis bahan baku yang digunakan serta daftar negara yang telah mengimpor produk tersebut.

Pertemuan juga membahas hasil inspeksi SFDA terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) Indonesia pada September 2023. Selain itu, terkait registrasi unggas dan daging, SFDA menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki fasilitas yang terdaftar sehingga tidak dapat memanfaatkan pengecualian impor untuk produk dengan proses termal. Proses registrasi daging merah akan mengikuti prosedur yang sama dengan registrasi UPI, yaitu melalui evaluasi, audit *on-site*, dan analisis CAPA.



NOVEMBER

Virtual Technical Meeting dengan World Health Organization (WHO) dalam rangka Pemenuhan Persyaratan WHO Listed Authority (WLA) BPOM

Sesuai *roadmap* yang telah disepakati antara BPOM dan WHO, Kamis (7/11/2024), WHO dan BPOM menyelenggarakan *virtual technical meeting* untuk membahas hasil penilaian mandiri pemenuhan persyaratan WLA BPOM. Pertemuan dengan tema “Indonesia *Self Benchmarking Feedback & Next Step* dalam rangka BPOM masuk ke dalam WLA” dibuka dengan *brief address* Kepala BPOM Taruna Ikrar.



Secara garis besar, hasil reviu WHO terhadap WHO *Global Benchmarking Tools* (GBT) yang disampaikan BPOM menyatakan bahwa BPOM telah menyediakan dokumen yang diperlukan dengan baik dan terstruktur. Selain itu, pemaparan terkait perubahan sejak WHO *Benchmarking* pada tahun

2018 sangat transparan dan memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan.

Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi terhadap hasil reviu WHO. Dari reviu ini, WHO memerlukan konfirmasi terhadap fungsi-fungsi yang terdapat pada GBT. Setelah pertemuan ini, masih terdapat beberapa tahapan yang akan dilewati BPOM hingga proses penilaian akhir dan pemberian keputusan.

Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Amerika Serikat

Kepala BPOM melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada tanggal 15–18 November 2024. Kunjungan ini meliputi partisipasi sebagai pembicara tamu di Harvard Medical School, Harvard University, Boston, serta pertemuan strategis dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles (KJRI LA).

Kuliah Umum di Harvard Medical School, Harvard University, Boston



Dalam kunjungan ke Harvard Medical School, Kepala BPOM diundang sebagai pembicara tamu dalam sesi akademik yang dihadiri oleh para guru besar, dosen, mahasiswa, dan praktisi riset di bidang kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM memaparkan hasil penelitian terkait terapi berbasis farmakologi sel dan genetik, termasuk potensi teknologi CRISPR dan *stem cell* dalam pengobatan penyakit langka. Kuliah umum ini juga menjadi momentum strategis untuk mempromosikan inovasi BPOM dalam mendukung riset obat baru di Indonesia. Melalui diskusi mendalam dengan peserta, terbuka peluang kerja sama, termasuk pengembangan proyek riset bersama (*joint research projects*) dengan institusi riset di Amerika Serikat.

Pertemuan dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia Los Angeles (KJRI LA):



Dalam pertemuan dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, dibahas sejumlah agenda strategis yang berfokus pada kolaborasi di sektor farmasi. Kepala BPOM dan Konsul Jenderal berdiskusi mengenai potensi kerja sama dengan perusahaan obat dan suplemen kesehatan di Amerika Serikat, terutama untuk mendukung investasi di sektor farmasi di Indonesia. Data perusahaan farmasi potensial yang tertarik menjajaki pasar Indonesia juga dipresentasikan, termasuk peluang produksi vaksin dan obat generik.

Selain itu, diskusi juga mencakup strategi promosi produk kosmetik dan pangan olahan Indonesia di pasar Amerika Serikat, dengan fokus pada pemenuhan regulasi United States of Food and Drug Administration (FDA). Kedua pihak juga merancang rencana penyelenggaraan forum bisnis Indonesia-Amerika Serikat guna memperkuat jejaring kerja sama antara pelaku usaha kedua negara. Forum ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperluas ekspor produk unggulan Indonesia, terutama dari sektor UMKM. Dukungan terhadap komunitas diaspora Indonesia di wilayah California juga menjadi agenda penting dalam pertemuan ini, dengan tujuan memperluas jaringan pemasaran produk Indonesia.

Kolaborasi BPOM dengan Kementerian BUMN dalam rangka Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing UMKM di Pasar Global



Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Selasa (26/11/2024). Nota kesepahaman ini berisi tentang koordinasi tugas dan fungsi kedua lembaga dalam mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan.

Kolaborasi dan komitmen kedua lembaga ini akan mendorong pertumbuhan UMKM pada sektor obat dan makanan di Indonesia dan meningkatkan produksi produk dalam negeri. Nota Kesepahaman ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga Desember 2023, terdapat 10.105 UMKM di sektor obat dan makanan, dengan 9.048 UMKM bergerak di bidang pangan olahan (89,54%) dan 1.057 UMKM di sektor obat bahan alam serta kosmetik (10,46%). PaDi UMKM telah menjembatani lebih dari 400.000 produk UMKM dengan pembeli dari BUMN, perusahaan swasta, dan pemerintah. BPOM dan Kementerian BUMN akan memprioritaskan percepatan perizinan dan pendampingan bagi UMKM yang terdaftar di PaDi UMKM ini.



K S H M



BADAN POM

2024

Prioritas awal kerja sama ini adalah untuk mempercepat perizinan UMKM sehingga produk yang dipasarkan melalui PaDi UMKM yang umumnya telah mendapatkan pesanan dari berbagai BUMN, pemerintah, dan swasta merupakan produk yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Selain itu, PaDi UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam mendampingi dan memberikan informasi kepada UMKM mengenai penerapan cara produksi yang baik dan proses perizinan BPOM yang mudah dan cepat. Tahap selanjutnya akan dilakukan pembinaan UMKM lainnya seperti UMK Ibu-ibu Mekaar yaitu ibu-ibu prasejahtera yang mengembangkan usaha rumah tangga. Program ini ditujukan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan.

Menteri BUMN berharap melalui MoU ini dapat mendorong pengembangan UMKM melalui 3 tahapan, antara lain melibatkan PaDi UMKM, yaitu sebuah ekosistem yg sudah dibangun sejak 2020. Pengadaan tender pada perusahaan BUMN yang nilainya di bawah 15 miliar rupiah harus dilakukan oleh UMKM dengan syarat pengelolanya tidak terafiliasi dengan BUMN. Erick Thohir menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini telah terdata sebanyak 50.000 vendor UMKM yang 90% di antaranya merupakan produsen makanan sehingga ini dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi antara BUMN dan BPOM.

Di sela-sela kegiatan penandatanganan MoU, Kepala BPOM Taruna Ikrar turut mengajak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengunjungi BPOM Command Center (BCC). BCC ini merupakan ruang pemantauan pemantauan terhadap seluruh proses bisnis BPOM secara terpusat, terintegrasi, dan komprehensif setiap waktu termasuk pemantauan data sertifikasi produk UMKM.

Partisipasi Aktif BPOM pada Pertemuan ke-13 *Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM)*

Pertemuan ke-13 *Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM)* di Jenewa berlangsung pada 20-22 November 2024, diikuti delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang diwakili PTRI Jenewa dan BPOM. Pertemuan diawali dengan *Steering Committee Meeting* pada 19 November 2024.



Dr. Yukiko Nakatani, Asisten Direktur Jenderal WHO, membuka acara ini dengan apresiasi kepada *Steering Committee* atas upaya mereka dalam mengatasi obat substandar dan palsu. Dr. Nakatani juga menekankan pentingnya evaluasi independen untuk meningkatkan efektivitas MSM.

Sekretariat memberikan pembaruan tentang pencapaian penting, termasuk peningkatan pelaporan melalui portal GSMS WHO dan kemajuan 10 aktivitas prioritas MSM. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya keberlanjutan pembiayaan untuk mendukung rencana kerja MSM.

Pertemuan ke-14 MSM SFMP direncanakan pada 12-14 November 2025, dengan *Steering Committee* pada 11 November 2025, untuk melanjutkan diskusi tentang tantangan obat substandar dan palsu.

Kunjungan Delegasi BPOM ke Belanda dalam rangka Penguatan Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tanggal 11–14 November 2024, Delegasi Republik Indonesia (Delri) dari BPOM, yang dipimpin oleh Pakar Ahli Kepala BPOM Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi Tahun 2024, Ibu Rita Endang, bersama Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, serta Ketua Tim Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, mengadakan serangkaian pertemuan dengan Wageningen University and Research (WUR), FrieslandCampina, dan Programma Uitzending Manager (PUM).



Dalam pertemuan dengan WUR pada 11 November, Delri BPOM membahas program studi Food Science serta pelatihan di bidang toksikologi dan mikrobiologi bagi pegawai BPOM. Pada 12 November, kunjungan ke FrieslandCampina Veghel memberikan wawasan terkait kontrol kualitas, keberlanjutan, dan teknologi

pengolahan susu, termasuk peluang kerja sama dalam penyediaan laktosa untuk industri farmasi.

BPOM juga bertemu dengan PUM, organisasi non-profit Belanda yang mendukung UMKM, untuk memperluas cakupan pendampingan bagi UMKM pangan dan kosmetik di luar Jawa. Selain itu, dalam courtesy call kepada Duta Besar RI di Den Haag, BPOM membahas penerapan *Front of Pack Nutrition Label* di Belanda serta potensi ekspor bumbu rendang ke pasar Belanda dan Eropa.



Selain itu, Delri BPOM juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia guna membahas peluang kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam pertemuan ini, dibahas potensi peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan bersama, serta peluang kerja sama dalam harmonisasi regulasi untuk memperkuat perdagangan produk farmasi dan pangan antara Indonesia dan Belanda. Kedua pihak juga sepakat untuk terus menjajaki mekanisme pendanaan yang dapat mendukung program pelatihan dan pengembangan kapasitas BPOM di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut, BPOM akan mengembangkan program pelatihan toksikologi dan mikrobiologi, mengadaptasi praktik terbaik FrieslandCampina dalam pengawasan industri susu, serta menyusun Letter of Intent (LoI) dengan PUM. Koordinasi dengan KBRI Den Haag juga akan diperkuat untuk mendukung pengembangan UMKM dan promosi produk Indonesia di Belanda.

DESEMBER

Re-Assessment Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) dalam rangka Proses Perpanjangan Keanggotaan BPOM sejak 2012



Kegiatan *re-Assessment* PIC/S yang dilaksanakan di Kantor BPOM dari tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024, dilakukan sebagai bagian dari proses perpanjangan keanggotaan BPOM yang telah dimulai sejak tahun 2012. PIC/S merupakan pengaturan kerja sama informal yang tidak mengikat antara para pemegang otoritas untuk memastikan terpenuhinya standar cara pembuatan obat yang baik (*Good Manufacturing Practice/GMP*) dalam produksi obat yang dilakukan oleh industri farmasi.

Mengingat pentingnya otoritas pengawasan obat dan makanan di suatu negara, proses penilaian pada pemegang otoritas GMP sangat penting dilakukan. Penilaian tersebut untuk memeriksa bahwa sistem inspeksi dan perizinan GMP, sistem mutu, peraturan perundang-undangan, pelatihan Inspektur, dan lainnya yang terkait dengan pengawasan pada industri farmasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada.



Berdasarkan hasil *re-assessment* yang dilakukan selama tiga hari oleh para assessor PIC/S, BPOM mendapatkan predikat terbukti memenuhi persyaratan PIC/S dalam hal kesetaraan dan kepatuhan.

BPOM dan Kedubes Amerika Serikat, Perkuat Kemitraan Strategis dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Yang Mulia Kamala Shirin Lakhdar, di kantor Kedutaan Besar AS pada tanggal 6 Desember 2024. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengawasan obat dan makanan, dengan fokus pada berbagai isu prioritas dan peluang kerja sama bilateral.

Peningkatan Kolaborasi dengan USFDA

Kepala BPOM menyampaikan usulan peningkatan kerja sama strategis dengan US Food and Drug Administration (USFDA) melalui pembentukan Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia, sekaligus mendukung BPOM dalam meraih status WHO Listed Authority. Usulan ini mencerminkan pendekatan terstruktur yang telah diterapkan pada kerja sama serupa antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan AS.



Akses Terhadap Terapi Inovatif

Kepala BPOM menyoroti pentingnya mempercepat akses terhadap obat inovatif termasuk produk *gene therapy* asal AS yang belum tersedia di Indonesia. “BPOM melakukan percepatan registrasi melalui mekanisme *reliance*, yang memungkinkan penyelesaian proses registrasi dalam 120 hari kerja (HK), atau 100 HK untuk obat esensial yaitu obat program kesehatan nasional, obat *life saving*, dan obat untuk penyakit langka (*orphan drug*),” jelas Taruna Ikrar.

Bahkan, BPOM sedang merevisi peraturan registrasi obat untuk mempercepat proses evaluasi obat inovasi dimana kami akan mempersingkat waktu evaluasi registrasi melalui mekanisme *reliance* dari 120 HK menjadi 90 HK. Langkah ini mencerminkan komitmen BPOM untuk mendukung inovasi dan meningkatkan aksesibilitas terapi baru bagi masyarakat Indonesia.

Kerja Sama Global dan Efisiensi Proses Registrasi



Duta Besar AS menekankan pentingnya efisiensi dalam proses registrasi obat dan makanan. Kepala BPOM menjelaskan bahwa reformasi strategis sedang dilakukan, termasuk pembentukan tim spesialis untuk mempercepat penilaian produk obat baru dan penguatan mekanisme *peer review*.

Selain itu, sistem registrasi pangan olahan telah dioptimalkan, dengan durasi penyelesaian yang bervariasi berdasarkan tingkat risiko produk, mulai dari risiko rendah hanya 1 HK, risiko menengah selama 5 hari kerja, dan risiko tinggi selama 30 hari kerja.

Keamanan Data dan Kepatuhan Global

Isu keamanan data juga menjadi perhatian bersama, mengingat perlindungan informasi rahasia perusahaan menjadi prioritas dalam registrasi online. Kepala BPOM menegaskan bahwa sistem cadangan di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) telah diimplementasikan untuk memastikan keamanan data. Di sisi lain, Kedubes AS mengapresiasi kepatuhan BPOM dalam notifikasi regulasi ke WTO, khususnya terkait rencana regulasi pelabelan kandungan gula, garam, dan lemak yang berpotensi memengaruhi perdagangan global.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan

Pertemuan ini menegaskan kesamaan visi antara BPOM dan Kedutaan Besar AS dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan yang berbasis inovasi, efisiensi, dan keamanan. Sebagai tindak lanjut, BPOM akan menyusun langkah strategis bersama kedeputusan teknis terkait untuk mendukung implementasi kerja sama bilateral ini. Koordinasi intensif dengan Kedubes AS juga akan dilakukan untuk memastikan sinergi dan keberlanjutan program kerja sama yang saling menguntungkan.

Melalui dialog yang konstruktif dan strategis ini, diharapkan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat semakin kokoh, tidak hanya dalam pengawasan obat dan makanan, tetapi juga dalam kontribusi bersama menghadapi tantangan kesehatan global.

Kerja Sama Pangan Aman Goes to Campus



Kepala BPOM Taruna Ikrar menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan 19 perguruan tinggi sekaligus meluncurkan secara resmi program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC)–Merdeka Belajar Kampus Merdeka *Platform* Universitas, pada tanggal 9 Desember 2024.

Perguruan tinggi yang menandatangani MoU antara lain: Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Jember, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Padang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Syah Kuala, Universitas Lampung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Djuanda, STIKES Papua, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Dharma Andalas, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas

Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Mataram, dan Universitas Islam Negeri Alaudin.

Kerja sama ini bertujuan menciptakan SDM unggul di bidang obat dan makanan serta mempercepat pengembangan dunia usaha dengan berfokus pada UMK. Tujuan utama dari program ini adalah membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing demi mencapai kemandirian bangsa.

Program PAGC ini memberikan kompetensi sebagai fasilitator keamanan pangan, yang memungkinkan mahasiswa untuk berkontribusi, memperluas wawasan, dan meningkatkan kompetensinya di Masyarakat.

Sampai dengan Desember 2024, BPOM telah menjalin kerja sama dengan 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia untuk melaksanakan program PAGC. Kerja sama ini juga telah melahirkan 551 Fasilitator Keamanan Pangan dari kalangan mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi fasilitator keamanan pangan, karyawan industri, atau *entrepreneur* yang andal dan kompeten serta berkontribusi pada pewujudan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kompetensi Tim Media Sosial di Lingkungan BPOM Melalui Meet The Expert



Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menggelar *Meet the Expert*—pelatihan komunikasi publik yang dihadiri langsung oleh pakar komunikasi publik—pada 10 Desember 2024. Narasumber yang hadir ialah Frisky Febrian, seorang Tenaga Ahli Muda di Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pelatihan ini secara khusus membahas penyusunan *agenda setting* yang akan diterapkan di lingkungan BPOM, baik di tingkat pusat maupun di masing-masing unit kerja. Pendekatan *agenda setting* menjadi solusi strategis untuk membantu BPOM memetakan isu-isu prioritas, menyusun narasi yang relevan, serta memastikan pesan disampaikan pada waktu yang tepat melalui saluran komunikasi yang efektif. Dengan

strategi ini, BPOM dapat memperkuat citra sebagai lembaga yang transparan, responsif, dan proaktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, *Meet the Expert* juga menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama antar pengelola media sosial di lingkungan BPOM. Kolaborasi yang solid akan meningkatkan kemampuan tim dalam menyusun strategi komunikasi yang relevan dan berdampak, sekaligus memperkuat koordinasi komunikasi publik BPOM guna memastikan transparansi dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.



Peran Aktif BPOM pada *The 3rd Meeting of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs)*

Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri *the 3rd Meeting of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs)* yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 17-18 Desember 2024. Forum prestisius ini mempertemukan otoritas regulator obat dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas penguatan pengawasan obat, mendorong inovasi, dan memfasilitasi kolaborasi global dalam sektor kesehatan.



Dalam kapasitasnya sebagai salah satu pembicara, Taruna Ikrar menyampaikan paparan bertajuk “*The NMRA Experiences on Collaboration with Academia to Support R&D*”. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan akademisi dalam mendorong riset dan pengembangan (R&D) guna memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.

Forum ini menjadi momentum strategis bagi negara-negara OKI untuk bertukar pandangan, berbagi pengalaman, dan mempromosikan praktik terbaik (*best practices*) dalam penguatan pengawasan obat dan makanan. Dengan maraknya tantangan global seperti resistensi antimikroba, peredaran produk ilegal, serta kesenjangan akses terhadap obat berkualitas, kolaborasi lintas negara dan sektor menjadi semakin penting. Selain itu, forum ini juga menjadi katalisator dalam mendorong inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi registrasi obat, dan memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko.



Salah satu capaian penting dari pertemuan ini adalah lahirnya Riyadh Declaration, sebuah dokumen komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan obat dan makanan di negara-negara anggota OKI. Selain itu, forum ini menyepakati *Plan of Action (POA) 2025–2026* yang menjadi panduan implementasi program kerja sama di masa mendatang, termasuk fokus pada harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta kolaborasi dalam pengembangan penelitian dan pengawasan berbasis risiko.

Pertemuan Bilateral Kepala BPOM dengan CEO Saudi Food and Drug Authority (SFDA)

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengadakan pertemuan bilateral dengan CEO *Saudi Food and Drug Authority* (SFDA) di sela-sela *The 3rd Meeting of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs)* di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama pengawasan obat dan makanan serta membahas tantangan ekspor produk Indonesia ke Timur Tengah. CEO SFDA Prof. Hisham Al Jadhey menyambut baik kunjungan delegasi BPOM dan menekankan pentingnya sinergi antara kedua negara dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar.

Salah satu agenda utama pertemuan adalah perpanjangan dan perluasan MoU antara BPOM dan SFDA yang telah ditandatangani sejak 2020. MoU ini mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyederhanaan prosedur ekspor. Selain itu, BPOM menyampaikan upaya untuk memperoleh pengakuan sebagai WHO Listed Authority (WLA), yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas produk farmasi Indonesia di pasar internasional. SFDA menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas regulator di tingkat global.



Diskusi juga membahas kendala ekspor produk Indonesia, termasuk hasil inspeksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan regulasi terkait obat bahan alam (OBA). BPOM mengusulkan solusi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar SFDA dan mempercepat registrasi produk. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan teknis lanjutan guna mencari solusi konkret dalam membuka akses pasar. Diharapkan, kerja sama yang semakin erat ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia produk obat dan pangan yang berkualitas di pasar global, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Instansi

1.1.1. Visi dan Misi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Utama yang memberikan dukungan manajemen di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian visi dan misi BPOM yaitu:

Visi:

“Obat dan Makanan Aman meningkatkan Kesehatan masyarakat dan daya siang bangsa”

Misi:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

1.1.2. Tujuan

Sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Utama, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Utama BPOM, yaitu:

- a. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;



- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi *stakeholder* Sekretariat Utama; dan
- c. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional, dan inovatif.

1.1.3. Tugas dan Fungsi

Untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut, serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

1.1.4. Budaya Organisasi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat senantiasa mengedepankan penerapan *Core Value* Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Budaya Organisasi BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. *Core value* dan budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Sebagai ASN, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menerapkan *core value* BERAKHLAK seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 Core Value BERAKHLAK



KSHM



BADAN POM

2024

Core value ini senantiasa diterapkan melalui 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan seperti pada Gambar 2:

Profesional	Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
Integritas	Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Kredibilitas	Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
Kerja Sama Tim	Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
Inovatif	Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaiuan teknologi terkini
Responsif/ Cepat Tanggap	Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Gambar 2 Budaya Kerja PIKKIR

1.1.5. Struktur Organisasi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat secara struktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama BPOM. Sejalan dengan penyederhanaan organisasi dan birokrasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung dengan Jabatan Fungsional dengan dukungan koordinator dan sub koordinator, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3 Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

1.2. Peta Strategi, Sasaran dan Indikator

Untuk mengukur kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun peta strategi, sasaran dan indikator sebagaimana Gambar 4. Perkembangan situasi dan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal mempengaruhi fungsi strategis BPOM dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.



Gambar 4 Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki 9 Sasaran Program dan 15 indikator sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
2.		Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	77,13
4.		Indeks opini publik BPOM	85,1
5.		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,89



KSHM



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88
7	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2
8.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86
9.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80
10	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai <i>agenda setting</i>	98,6
11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	86,32
12		Nilai Kearsipan Biro Kerja Sama dan Humas	96,41
13	Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	85,2
14	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	3
15	Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100 (Efisien)

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat didukung oleh 5 (lima) kelompok substansi dengan jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari 50 orang, yang terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dari 50 pegawai tersebut, terdapat 48 pegawai aktif bekerja dan 2 orang tengah menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CDTN).

2.1.1. Data Kepegawaian

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat saat ini didukung dengan mayoritas SDM yang berpendidikan Sarjana dan Pascasarjana (S2) dan dalam usia produktif. Gambaran SDM Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan pendidikan seperti pada Tabel 2.

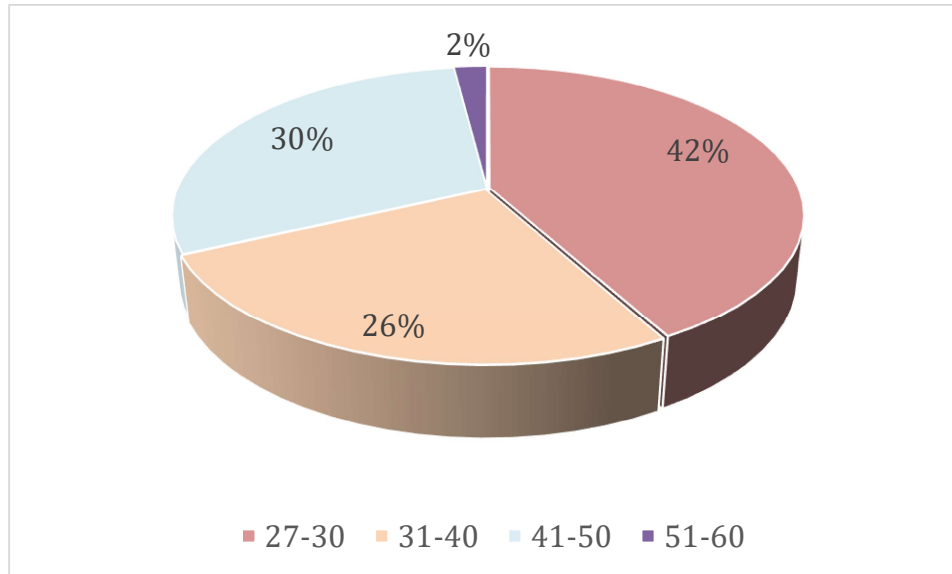
Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	PNS	PPPK	PPNPN	Total	%
S2	13		1	14	28
Profesi	4			4	8
S1	21	4	2	27	54
D3	4	1		5	10
Jumlah	42	5	3	50	

Dari latar belakang pendidikan, sebanyak 54% pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah Sarjana, diikuti oleh pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 26%, S1 Apoteker sebanyak 8% dan Diploma III 10%.

2) Berdasarkan Usia

Data per tanggal 31 Desember 2024, Pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat termuda berusia 27 tahun dan tertua 54 tahun. dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini:



Gambar 5 Data Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan data diatas Usia pegawai terbanyak berada pada usia 27-30 tahun sebanyak 42%, usia 31-40 tahun 26% dan usia 41-50 tahun 30%, sedangkan usia diatas 50 tahun terdapat 2% dari jumlah pegawai baik ASN maupun PPNPN.

3) Berdasarkan Jabatan

Dari 47 orang ASN, 1 (satu) orang menduduki jabatan structural (Kepala Biro), 42 orang menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT), dan 4 orang menduduki jabatan fungsional umum. Gambaran data pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Struktural	1
2	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Fungsional	1
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	6
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	1
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1
8	Arsiparis Terampil	Fungsional	2
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	1
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	3
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	3
12	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1
13	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Fungsional	2
14	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Fungsional	7
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	10
16	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1
17	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1
18	Pelaksana	Pelaksana	2
19	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	1
20	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	1
	Jumlah		47

2.1.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2024, kebutuhan SDM di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan jabatan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja

No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	1	1	0	100%
2	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0	100%
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	6	6	0	100%
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	0	100%
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	0	100%
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	1	0	100%
7	Arsiparis Terampil	2	2	0	100%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	0	1	-1	100%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	0	3	-3	100%



KSHM



BADAN POM

2024

No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	0	3	-3	100%
11	Perencana Ahli Pertama	2	1	1	50%
12	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	9	2	7	22.22%
13	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	15	7	8	46.67%
14	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	23	10	13	43.48%
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	100%
16	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	1	1	50%
17	Pranata Komputer Terampil	1	1	0	100%
18	Pelaksana	0	2	-2	100%
19	Penata Layanan Operasional	0	1	-1	100%
20	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1	100%
21	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1	0%
22	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	0%
23	Arsiparis Mahir	1	0	1	0%
24	Perencana Ahli Muda	1	0	1	0%
25	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	0%
26	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1	0%
27	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1	0%
TOTAL		73	47	26	64.38%

2.1.3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjawab tantangan dan ekspektasi pimpinan serta mitra kerja sama yang semakin tinggi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus meningkatkan kompetensi SDM baik dari sisi teknis maupun *soft skill*. Keterbatasan SDM saat ini menuntut pegawai dapat berkinerja dengan *smart* dan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target kinerja dengan baik.

Pada tahun 2024, terdapat 1 orang pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang mengikuti pendidikan lanjutan melalui tugas Belajar atas nama Erika Juliani pada Program Studi S-1 Sistem Informasi di Universitas Terbuka, Jakarta.

Sedangkan peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama dan Humas melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop yang dilakukan, antara lain:

1) Workshop Informasi dan Komunikasi, diantaranya terkait pelatihan sebagai berikut:

- *Meet the Admin* “Meracik Informasi, Menarik Atensi”;
- WIKOM “Kerja Cepat untuk si Sapu Jagat”;
- *Meet the Expert* “Menguasai Agenda untuk Komunikasi Bermakna”;
- “Ngobrolin Video” (NgoVi) “Tingkatkan Kualitas Konten Pemerintah”;
- *Workshop Hosting dan Public Speaking Podcast* TA. 2024.

2) Workshop Kerja Sama Dalam Negeri sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2024⁴³, yang diikuti oleh Tim Pengelola Kerja Sama Dalam Negeri dari seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia;
- *Workshop “Adapting To Global Trends: How Smes Can Lead In Ethical Beauty* yang diikuti oleh fasilitator BPOM dan UMKM di bidang kosmetik;

3) *Workshop* Kerja Sama Luar Negeri sebagai berikut:

- *Workshop Wellness Meets Excellence*: Mewujudkan ASN BPOM Sehat, Profesional, dan Unggul dalam Pelayanan Publik
- *Workshop* Perundingan Perdagangan Internasional Penyusunan Modalitas dan *Product Specific Rules* untuk Pos Tarif Binaan BPOM
- *Workshop Personal Branding Digital* untuk Pegawai BPOM Tahun 2024
- *Workshop* Peningkatan Profesionalisme ASN melalui Komunikasi Lintas Budaya

4) Bimbingan Teknis terkait Manajemen Risiko.

2.2. Sarana dan Prasarana

Ruang kerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berlokasi di gedung Panacea Lantai 5 dan 6. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan, terdapat kebutuhan sarana dan prasarana Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah diharapkan	Tersedia	Kebutuhan
1	PC	25	23	2
2	Laptop	53	44	9
3	Meja staf	50	59	0
4	Kursi staf	50	59	0
5	Laci staf	50	59	0
6	Printer	20	19	1
7	Scanner	5	3	2
8	Camera Digital	12	11	1
9	Handycam	9	7	2
10	Video Conference	3	2	1

2.3. Anggaran

Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp 14.796.790.000**. Rincian anggaran dan realisasi selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	3158 Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM				14.557.217.000	14.555.767.327	99,99%
	3158.AEC.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	100	107	107%	6.151.351.000	6.150.562.040	99,99%
1	051	25	26	104%	2.205.220.000	2.204.987.292	99,99%



KSHM



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral						
2	052 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral	50	53	106%	1.641.933.000	1.641.753.400	99,99%
3	053 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Dalam Negeri	25	28	108%	1.689.915.000	1.689.616.860	99,98%
4	054 Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1	1	100%	614.283.000	614.204.488	99,99%
	3158.EBA.003 Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	100%	7.453.689.000	7.453.133.885	99,99%
1	051 Pemberitaan dan Hubungan Media				1.816.303.000	1.815.927.114	99,98%
2	052 Publikasi				2.289.565.000	2.289.414.478	99,99%
3	053 Pengelolaan opini publik				3.347.821.000	3.347.792.293	100%
	3158.PEE.002 Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	2	50%	952.177.000	952.071.402	99,99%
1	051 Penyelenggaraan kerja sama dengan negara di Asia Pasifik/Afrika	1	1	100%	144.673.000	144.659.500	99,99%
2	052 Penyelenggaraan kerja sama dengan Negara Anggota OKI	1	1	100%	807.504.000	807.411.902	99,99%

BAB III
HASIL KEGIATAN BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

3.1. Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global

SK1. Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	
IKK 1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
IKK 2	Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

3.1.1 IKK 1: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	90	90,39	100,43%	2.588.633	2.588.360	99,99%

Sasaran Kegiatan ke-1 (SK1) Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global, diturunkan menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- a. IKK1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan; dan
- b. IKK2 Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah **90,39%** dari target Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 90%, sehingga capaian indikator adalah **100,43%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (Hijau)**.



Adapun pagu anggaran pada IKK1 adalah sebesar Rp. 2.588.633.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.588.360.117 atau **99,99%**.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah kerja sama dalam dan luar negeri BPOM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara BPOM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara BPOM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi BPOM.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK1, antara lain:

- a. Dukungan tim koordinasi kerja sama dalam negeri dari unit-unit kerja pusat maupun Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia. Tim ini tergabung dalam forum komunikasi melalui *Whatsapp Group* yang memudahkan penyampaian informasi terkait kerja sama. Anggota tim diperbarui setiap awal tahun dan setiap anggota baru dapat langsung bergabung ke forum komunikasi.
- b. *Monitoring* dan evaluasi implementasi kerja sama secara berkala setiap triwulan (3 bulan). *Monitoring* dan evaluasi (*monev*) penting dilakukan untuk memantau implementasi kerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. *Monev* dilakukan secara periodik setiap triwulan untuk meningkatkan pemenuhan rencana kerja yang telah disusun antara unit pengusul dengan mitra kerja sama, selama jangka waktu kerja sama. Apabila terdapat kerja sama yang belum terpenuhi di awal tahun, maka unit pengusul dapat segera merumuskan tindak lanjut implementasi kerja sama pada periode berikutnya. Dengan demikian diharapkan seluruh kerja sama telah dapat terimplementasi sesuai rencana kerja sebelum jangka waktu kerja sama berakhir. *Monev*



K S H M



BADAN POM

2024

- kerja sama juga merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan urgensi perpanjangan kerja sama setelah jangka waktu kerja sama berakhir. Kerja sama yang terimplementasi dengan baik dapat diperpanjang atau diperbarui, namun sebaliknya, kerja sama yang tidak terimplementasi dengan baik akan menjadi pertimbangan untuk tidak diperpanjang atau diperbarui.
- c. Pelaksanaan inovasi sarana pelayanan publik Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melalui kegiatan KONEKSI (Konsultasi, mONitoring, dan Evaluasi Kerja Sama dalam negeri). KONEKSI diadakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis secara daring melalui aplikasi Zoom;
 - d. Implementasi dari *Grant Agreement on Improved Access to Essential Medicines and Vaccines - WHO Joint Work Plan Biennium 2022 – 2023* yang merupakan komitmen WHO untuk mendukung program/kegiatan prioritas BPOM sesuai RPJMN 2020 – 2024, dalam rangka penguatan kapasitas BPOM, termasuk laboratorium, guna meningkatkan akses obat dan vaksin.
 - e. Pengajuan BPOM masuk ke dalam WHO *Listed Authority* (WLA) yang bertujuan untuk memastikan akses dan ketersediaan produk medis yang aman, efektif, dan berkualitas. Selain itu, kerangka ini mendukung optimalisasi sumber daya dengan memanfaatkan (melalui sistem *reliance*) hasil dari keputusan NRA yang terpercaya, baik dalam pengambilan keputusan oleh NRA, *Procurement Agencies*, maupun *the WHO Prequalification Programme*.
 - f. Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia, National Medical Products Agency (NMPA) Republik Rakyat Tiongkok (RRT)*, dll.
 - g. Beberapa kegiatan implementasi yang dilakukan seperti Partisipasi pada *2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS)*, Pendampingan Inspeksi Daging DAM di Arab Saudi, menghadiri *International Symposium for Asia Regulatory Coordination, Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok, Pelatihan API Assessment dengan TGA, Saudi Halal Expo di Riyadh, Arab Saudi, ADB-CoRE Training Workshop: Regulatory Oversight for Advanced Therapy Medicinal Products*, Pertemuan *BPOM - MFDS Criminal Investigation Division* tanggal 4 Desember 2024, dll



KSHM



BADAN POM

2024

- h. Implementasi berbagai kerja sama dalam negeri BPOM dengan mitra, khususnya di lingkungan UPT BPOM, seperti KIE, permohonan narasumber, dll.
- i. Pada forum bilateral, kerja sama dengan mitra yang ditindaklanjuti berupa:
- perumusan perjanjian kerja sama internasional BPOM dengan mitra, seperti yang berlangsung pada tahun 2024 yaitu The Central Drugs Standard Control Organisation - CDSCO (India), The Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy -PCIMH (India), The India Pharmacopeia (Inda), The Center for Pharmaceutical Products Safety (CPPS) of the Republic of Uzbekistan, United States Pharmacopeia (USP), European Directorate for the Quality of Medicine and Health Care (EDQM), United States Food and Drug Administration (USFDA), Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA);
 - kolaborasi BPOM dengan regulator mitra dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan melalui pertukaran informasi, pengembangan kapasitas regulator dan upaya peningkatan perdagangan

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
1	Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia	<p>A. Pertukaran informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan pembahasan <i>ATMP regulatory framework</i> dan rencana pelatihan/internship di TGA (6-8 Mei 2024) <i>MIT Consortium Meeting, RSP Steering Committee and Forum</i> di Siem Reap, Kamboja (10-12 Desember 2024) <p>B. Pengembangan kapasitas regulator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Workshop on Active Pharmaceutical Ingredients (API) Assessment</i> (17-20 September 2024) <i>RSP Workshop series: Regulation of Advertising and Online Sales of Medicines</i> (28-29 Oktober 2024)
2	<i>Pharmaceuticals and Medical Devices Agency</i> (PMDA) Jepang	<p>A. Pertukaran informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan bilateral antara BPOM dan MHLW/PMDA (19 Februari 2024)



KSHM



BADAN POM

2024

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
		<p>2) Partisipasi BPOM pada serangkaian kegiatan PMDA pada 22 - 24 April 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANM ke-6 2. APAC ke-13 3. APACRM ke-7 <p>B. Pengembangan kapasitas regulator obat dan makanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPOM: Workshop Systemic Toxicity Testing Training in BPOM via webinar 2) PMDA – ATC : Pharmaceuticals Review for 4 days in Tokyo (PMDA) 3) PMDA – ATC : Review of cell therapy and gene therapy products for 2 days Online 4) PMDA – ATC : Pediatric Review and Joint Seminar with U.S.FDA for 4 days in Tokyo (PMDA) 5) Partisipasi BPOM pada 4th APAC Regional chapter meeting 6) BPOM: Workshop on Lot Release for Biological Products via webinar 7) PMDA – ATC : Good Manufacturing Practice (GMP) supported by PIC/S for 3 days in Toyama Prefecture 8) Empowering Regulatory Excellence: Workshop on AdVAnCED ThERapy Medicinal Products 9) PMDA – ATC : Herbal Medicine for 4 days in Toyama Prefecture 10) PMDA – ATC : Pharmaceuticals Review for 3 days Online
3	<p><i>The Ministry of Food and Drug Safety of The Republic of Korea (MFDS)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Webinar terkait <i>Safe Use of Recycled Food Packaging Materials</i> 2. AI Regulatory & International Symposium (AIRIS) 2024 3. Pertemuan dengan Korea <i>Embassy Counsellor</i> 4. Menghadiri <i>the 2nd Asia-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS)</i> 5. <i>Antimicrobial Resistance Webinar</i> 6. <i>Joint Symposium</i> Kerja Sama Farmasi antara Indonesia dan Korea Selatan serta Pertemuan Bilateral antara BPOM - MFDS 7. Pendampingan Perwakilan MFDS ke Fasilitas Produksi Chong Kun Dang dan Daewong Biologic 8. Webinar terkait <i>the Korean system for the recognition of overseas food safety laboratories</i>



KSHM



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
		<p><i>and Singapore's proposal to CCASIA regarding novel food ingredients</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. <i>2024 One-Asia Cosmetics & Beauty Forum</i> 10. <i>Webinar to share a temporary access to the food regulation information database and getting feedback/comments and to share good practices and experiences to ensure safety of food sold online (esp. for cross-border purchases)</i> 11. <i>Webinar on Indonesian food and health supplement system</i> 12. <i>Webinar to share experience for food safety implications from the use of environmental inhibitors</i> 13. <i>Kegiatan Benchmarking Regulasi dan Pengawasan Kosmetik/Produk Estetik</i> 14. <i>Asia-Pacific INFOSAN Hybrid Meeting: Enhancing the International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) in the Asia-Pacific Region dan Pertemuan Bilateral</i> 15. <i>Kunjungan Perwakilan MFDS Criminal Investigation Division ke BPOM</i> 16. <i>Pendampingan BPOM pada saat Kunjungan MFDS Criminal Investigation Division ke BNN</i>
4	<i>Saudi Food and Drug Authority (SFDA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Pertemuan teknis BPOM dengan SFDA membahas perkembangan ekspor pangan ke Arab Saudi</i> 2) <i>Pertemuan Bilateral antara Kepala BPOM dengan CEO SFDA membahas terkait ekspor pangan hewani Indonesia ke Arab Saudi</i>
5	National Medical Products Administration (NMPA)	Pertemuan Plt. Kepala BPOM dengan Deputy XU Jinghe, <i>Deputy Commissioner</i> dari NMPA di <i>NMPA Headquarters, RRT</i>
6	University of Wisconsin Madison Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Komunikasi mengenai evaluasi pelaksanaan pelatihan tahun 2023</i> - <i>Komunikasi mengenai rencana MoU baru karena MoU sebelumnya telah berakhir pada 23 September 2024</i>
7	Michigan State University (MSU)	MSU memberikan sponsorship bagi dua peserta dari Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:



KSHM



BADAN POM

2024

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
		<ol style="list-style-type: none"> Partisipasi BPOM pada <i>International Short Course in Food Safety</i> di Michigan State University, East Lansing, Amerika Serikat.pada tanggal 21 - 27 Juli 2024. Partisipasi BPOM pada <i>Global Food Safety Symposium</i> di Michigan State University,pada tanggal 21-24 Juli 2024.
8	Kementerian Kesehatan Palestina	Program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina dilaksanakan secara offline di Amman, Jordan pada tanggal 20-23 Mei 2024. KSS ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina
9	Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) Brasil	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi MoU antara BPOM dan ANVISA pada tanggal 8 Mei 2024 Sharing knowledge sistem pengawasan obat dan makanan yang beredar secara daring dengan memanfaatkan <i>artificial intelligence (AI)</i> yaitu Epinet System pada tanggal 9 April 2024
10	AIFAESA, I.P, Timor-Leste	<ol style="list-style-type: none"> BPOM sebagai narasumber pada Seminar Internasional "<i>The Role of AIFAESA in Ensuring Products Quality for Consumers</i>" dengan topik "<i>Food Fraud and Inspection Practices</i>" di Dili (14 November 2024) Pertemuan AIFAESA dan BBPOM di Denpasar untuk pertukaran informasi mengenai keamanan pangan dan <i>food security</i> untuk tamu VVIP/VIP serta kunjungan laboratorium (25, 26, 27, 29 November 2024 dan 2, 3, 4, 6 Desember 2024) Pertemuan Kepala BPOM-Inspektur Jenderal AIFAESA untuk membahas kerja sama (11 Desember 2024)
11	Centre of Regulatory Excellence (CoRE) Duke-NUS Medical School Singapura	<p>Pertukaran informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partisipasi pada <i>CoRE 10th Anniversary Scientific Conference: Regulating the Future of Health</i> di Singapura (14-15 Oktober 2024) <p>Pengembangan kapasitas regulator</p> <ol style="list-style-type: none"> Training <i>Fundamental of Health Product Regulation</i> (9-13 September 2024)

No	Mitra Kerja Sama	Kegiatan Kolaborasi
		2. <i>Training Regulatory Oversight of ATMP</i> (11-14 November 2024)
12	Kementerian Agama	Inspeksi Daging DAM di Ithlath, Arab Saudi

3.1.2. IKK 2: Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90	90,13	100,15%	2.569.982	2.569.630	99,99%

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah **90,13%** dari target Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 90%, sehingga capaian indikator adalah **100,15%** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Adapun pagu anggaran pada IKK2 adalah sebesar Rp. 2.569.982.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.569.630.388 atau 99,99% dengan kategori Baik.

Peran BPOM adalah partisipasi/kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara BPOM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.



KSHM



BADAN POM

2024

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK2, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM, Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, dll terkait penyampaian masukan dan posisi BPOM;
- b. Keikutsertaan dan partisipasi aktif BPOM dalam pertemuan dan konferensi internasional yang membahas regulasi dan pengawasan obat dan makanan.
- c. Penyusunan telaah, kajian serta usulan posisi BPOM terkait perundingan atau forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

Pada tahun 2024, peran BPOM dalam forum bilateral, regional dan multilateral berupa intensifikasi/fasilitasi koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kertas posisi BPOM dalam perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, sebagai berikut:

- a) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri bilateral sebagai berikut:

No	Mitra Kerja Sama	Isu
1	Australia Awards	Penjajakan dukungan beasiswa program <i>short course</i> dan pendidikan lanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi pegawai BPOM
2	Center for Continuing Education, University of Sydney	Penjajakan <i>tailor-made training</i> untuk peningkatan kapasitas BPOM di bidang perencanaan dan penganggaran
3	Menteri Kesehatan Sudan	Kepala BPOM dan Menteri Kesehatan Sudan melaksanakan pertemuan bilateral di sela-sela Indonesia Africa Forum II pada tanggal 3 September 2024 terkait bantuan teknis penguatan kapasitas regulasi obat
4	KBRI Riyadh	BPOM berpartisipasi pada pameran <i>Saudi International Halal Expo & Summit 2024 28-30 Oktober 2024</i> dengan memberikan desk konsultasi terkait persyaratan registrasi di booth yang disediakan KBRI Riyadh
5	Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA)	BPOM dan TMDA memfinalisasi MoU dan melakukan penandatanganan MoU di sela-sela Africa Forum pada tanggal 3 September 2024
6	Tsinghua University	Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam <i>Indonesia-Tiongkok Joint Development and Research Center on Vaccine and Genomics</i> serta meninjau fasilitas riset



KSHM



BADAN POM

2024

No	Mitra Kerja Sama	Isu
		<p>mutakhir di Tsinghua <i>University</i>. BPOM mengusulkan peningkatan kapasitas pegawainya melalui pendidikan formal (S2/S3) dan <i>short course</i> di Tsinghua <i>University</i>. Selain itu, pertemuan ini juga mencakup penandatanganan MoU antara <i>Indonesia-Tiongkok Joint Development and Research Center on Vaccine and Genomics</i> (Tsinghua <i>University</i>) dan PT Increase Laboratorium Indonesia, yang berfokus pada riset kolaboratif, pengembangan kapasitas, dan pertukaran keahlian. PT Increase Laboratorium sendiri merupakan laboratorium yang berperan dalam uji klinik dan evaluasi uji klinik di Indonesia.</p>
7	CanSino Biologics Inc.	<p>BPOM meninjau fasilitas CanSino Biologics Inc. di kawasan industri Tianjin, yang memiliki fasilitas riset dan produksi vaksin terintegrasi. CanSino telah mengembangkan lima <i>platform</i> teknologi utama untuk vaksin inovatif, termasuk teknologi <i>viral vector</i> berbasis <i>Adenovirus</i>, desain protein struktural dan <i>virus-like particle</i> (VLP), bioteknologi sintetik, serta teknologi mRNA dan LNP. Dalam diskusi, BPOM meminta agar Indonesia dilibatkan dalam pengembangan produk CanSino, termasuk pelaksanaan uji klinik di Indonesia. BPOM juga menyambut baik rencana CanSino dan PT Etana Biotechnologies Indonesia untuk membangun fasilitas penelitian di Indonesia, yang diharapkan menjadi model kemitraan berkelanjutan dan transfer teknologi dalam pengembangan vaksin nasional.</p>
8	BeiGene	<p>BPOM meninjau fasilitas produksi Beigene Guangzhou untuk <i>clinical</i> dan produksi komersial, termasuk <i>drug substance suite line 1</i> (DS1), <i>drug product suite line 1</i> (DP1), serta QC Laboratorium, yang digunakan untuk pengembangan produk bersama mitra di Indonesia. Dalam diskusi, BPOM membahas <i>roadmap</i> kolaborasi dengan Etana Biotechnologies terkait transfer teknologi obat kanker PD-1 (Tislelizumab) yang telah dimulai sejak 15 April 2024, mencakup <i>drug product filling</i> dan <i>transfer method</i> QC. Pada 2025, direncanakan uji stabilitas dan studi <i>comparability</i>, sementara pada 2026, produk lokal yang diproduksi oleh Etana ditargetkan dapat diajukan untuk registrasi.</p>



KSHM



BADAN POM

2024

No	Mitra Kerja Sama	Isu
9	Shanghai Henlius Biopharmaceutical Co. Ltd/ Fosun Pharma	BPOM meninjau fasilitas manufaktur <i>drug substance</i> dan <i>drug product</i> di Xuhui Site untuk Trastuzumab dan Serplulimab, serta mendiskusikan rencana Henlius dalam melakukan transfer teknologi kedua produk tersebut ke Kalbe Genexine Biologics dan PT Pharma Metric Labs sebagai sponsor dan pelaksana uji klinik di Indonesia. Dalam diskusi, BPOM mengusulkan kolaborasi pertukaran pengetahuan terkait pengembangan pedoman tatalaksana pengobatan kanker menggunakan obat yang dikembangkan industri di Tiongkok, serta mendorong keterlibatan Indonesia dalam pipeline pengembangan obat inovatif di Henlius.
10	RNA Cure	BPOM bertemu dengan RNA Cure, perusahaan yang berfokus pada penelitian <i>platform</i> mRNA untuk pengembangan vaksin bagi hewan dan manusia, guna menjajaki potensi kerja sama antara pemerintah Indonesia dan RNA Cure. Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana kolaborasi RNA Cure dengan Etana Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan uji klinik multicenter. Selain itu, BPOM mengusulkan agar Prof. Lin berkunjung ke Indonesia untuk berbagi pengalaman terkait penelitian dan pengembangan vaksin mRNA.
11	United States of Pharmacopoeia (USP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan Plt. Ka Badan dengan CEO USP pada tanggal 25 Januari 2024 membahas rencana kolaborasi dengan USP di bidang peningkatan kapasitas. 2. Kepala BPOM menjadi narasumber pada APAC pada tanggal 9 September 2024 3. Workshop Accessing and Using USP Monograph secara online pada tanggal 13 Agustus 2024 4. Pemberian 20 akses gratis kepada BPOM untuk USP National Formulary online 5. Workshop on the Value of Pharmacopoeia Standard secara luring di Menara 165, Jakarta pada tanggal 21 November 2024
	EU-EDQM (European Directorate for the	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan POM RI (cq. Direktorat Standardisasi Obat NPP dan PPPOMN) dan EDQM telah



KSHM



BADAN POM

2024

No	Mitra Kerja Sama	Isu
	Quality of Medicine & Healthcare)	<p>mengadakan pertemuan virtual pada 2 September 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan awal terkait kolaborasi kerja sama antara BPOM dan EDQM di bidang standar mutu (harmonisasi Farmakope Indonesia dengan European Pharmacopoeia). 3. Kedua pihak sepakat untuk menyusun Initial Draft MoU. Penyusunan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 2 September 2024 lalu. 4. Saat ini Draft MoU tersebut telah mendapatkan masukan dari seluruh unit terkait serta Direktorat Hubungan dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri RI.
	USFDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Utama cq. Biro KSHM telah melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan unit teknis mengenai identifikasi ruang lingkup kegiatan kerja sama antara BPOM dan USFDA tanggal 10 Oktober 2024. 2. Berdasarkan pembahasan dan masukan yang diterima, Biro KSHM telah menyusun <i>initial draft</i> MoU dengan menyesuaikan lingkup kerja sama dengan kebutuhan strategis BPOM, seperti pengawasan daring dan peningkatan aksesibilitas dokumen penting. 3. Selain itu, Biro KSHM telah menyiapkan surat Kepala BPOM kepada <i>Commissioner of Food and Drugs</i> perihal <i>Proposal for Collaboration Between the Indonesian FDA and the USFDA</i>. 4. Pertemuan Ka BPOM dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia pada tanggal 6 Desember 2024 membahas peningkatan kerja sama strategis antara BPOM dan USFDA dalam bentuk MoU untuk mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

b) Perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra, sebagai berikut:



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
1	<i>Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I EU-CEPA)</i>	<i>Intellectual Property Rights (IPR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan <i>draft text</i> Artikel X.41 yang baru diajukan EU dapat diterima Indonesia karena mencantumkan frasa <i>as defined for that purpose by the relevant legislation</i>, yang mengacu pada peraturan terkait yang berlaku di masing-masing negara. Usulan ini telah mengakomodasi kepentingan Indonesia untuk tidak memberikan perpanjangan terhadap perlindungan paten, sekaligus tetap menghormati regulasi yang berlaku di tiap negara. • Penghapusan paragraf 2, 3, dan 4 pada Artikel X.41 sebelumnya, yang mengatur rincian perpanjangan paten yang bertentangan dengan regulasi di Indonesia, merupakan langkah positif dalam negosiasi ini. • Usulan klausul baru yang diajukan dari EU mengenai kerahasiaan data registrasi obat baru pada <i>Article X.44 Protection of Data Submitted to Obtain an Authorization to Put a Medicinal Product on the Market</i> telah diterima pada WG IPR putaran ke-17. <p>(Kertas Posisi BPOM untuk WG <i>Intellectual Property Right</i> IEU-CEPA putaran ke-17 tanggal 26 Februari 2024; dan Kertas Posisi BPOM pada WG IPR IEU-CEPA pada tanggal 5 Mei 2024)</p>
		<i>Trade in Good (TiG)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • BPOM telah menyampaikan posisi dalam penyusunan <i>3rd Offer</i> Indonesia untuk menyetujui 16 pos tarif dan



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>tidak menyetujui 9 pos tarif yang <i>direquest</i> EU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam 9 pos tarif yang tidak disetujui BPOM tersebut, terdapat 4 pos tarif dengan kategori <i>Non Specified</i> (NS) yaitu 29362700, 29400000, 29411011, dan 29411019 untuk kemudian diusulkan perubahan kategori menjadi EX (<i>exclusion</i>). • BPOM menyetujui <i>request EU</i> untuk pos tarif 35040000 yaitu B3 karena dilihat dari data rekomendasi impor yg diterbitkan BPOM periode 2020 s.d Mei 2024, importasi dari negara EU cukup tinggi dan HS tersebut tidak masuk dalam prioritas RIPIN.
2	Indonesia-Canada CEPA	<i>National Treatment and Market Access</i> (NTMA)	<ul style="list-style-type: none"> • BPOM telah menyampaikan tanggapan terhadap Daftar Pertanyaan Isu Pertanian – Chapter NTMA ICA-CEPA. • BPOM telah menyampaikan masukan pada Revised Offer dalam kerangka NTMA ICA CEPA sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 7 pos tarif binaan BPOM yang masuk dalam 2.209 pos tarif (dengan modalitas exclusion atau high sensitive) revisi offer untuk memenuhi tingkat liberalisasi ICA-CEPA sebesar 85%. 2. Usulan BPOM pada Initial Offer dalam Kerangka ICA CEPA, posisi offer BPOM telah sangat tinggi yaitu 92,8%, dengan hanya 10 pos tarif yang masuk



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>kategori exclusion dari total 139 pos tarif.</p> <p>3. Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar ketujuh pos tarif BPOM yang masuk dalam revised offer dengan kategori P3 untuk tidak di-offer (tetap masuk kategori exclusion) dengan salah satu pertimbangan ketujuh produk tersebut masuk ke dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035.</p>
		<p><i>Sanitary and Phytosanitary (SPS)</i></p>	<p>BPOM telah memberikan masukan:</p> <p>1. Salah satu isu terkait Badan POM yang mengemuka pada WG-SPS adalah Artikel X.11 Audits, paragraf 10 sebagai berikut:</p> <p><i>10. If the auditing Party makes a final audit report publicly available [IDN: as long as approved by the audited competent authority], the final audit report must incorporate, or be accompanied by, the comments or written response to the draft report provided by the competent authority of the audited Party.</i></p> <p>2. Menanggapi usulan Kanada tersebut, berikut ini tanggapan BPOM:</p> <p>a. Hasil inspeksi yg dilakukan hanya diberikan kepada perusahaan yang diaudit.</p> <p>b. Badan pom menerbitkan sertifikat yang dapat</p>



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>dibuka untuk publik sebagai output dr audit yang dilakukan</p> <p>c. Informasi publik terkait tupoksi Badan POM diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>d. Dalam hal ini, laporan inspeksi termasuk ke dalam Pasal 10 ayat (1) butir b yang berbunyi: (1) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas: b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>3. Sehubungan dengan permintaan masukan atas usulan alternatif <i>draft text</i> artikel X.11 paragraf 10 dari Indonesia, berikut ini masukan Badan POM:</p> <p><i>10. In the event of audit data and information contained in the final audit report are deemed confidential under the prevailing laws and regulations of respective Parties, the auditing party must seek written approval from the audited party prior to publishing such report.</i></p>



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>11. <i>The final audit report must incorporate the comments or written response to the draft report provided by the competent authority of the audited Party</i></p> <p>4. Hal-hal yang mendasari masukan Badan POM, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diusulkan dibagi menjadi dua paragraf untuk menghindari kesalahan pemahaman karena paragraf yang terlalu panjang b. Usulan Indonesia lebih mencerminkan kondisi yang berlaku di berbagai kementerian/lembaga. c. Informasi yang tercantum dalam laporan inspeksi merupakan informasi publik yang tidak dapat diberikan karena berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat sesuai PerBPOM No.33 tahun 2022. <ul style="list-style-type: none"> ● WG SPS telah disepakati bersama pada perundingan akhir tahun 2024
		IPR	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembahasan <i>Article XX.15: Protection of Undisclosed Test</i>



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p><i>or Other Data for Pharmaceutical Products.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Article XX.15 telah disepakati bersama pada perundingan putaran ke-7 di Semarang Indonesia 4-8 Maret 2024.
4	Indonesia EAEU FTA	TIG	<ul style="list-style-type: none"> BPOM telah menyampaikan masukan pada Improved Offer Indonesia dan Tanggapan terhadap Request List EAEU sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> BPOM telah melakukan kajian terhadap posisi 2nd offer Indonesia dalam rangka mencapai keseimbangan tingkat liberalisasi sesuai dengan parameter baru yang telah disepakati terutama untuk kategori A15. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kami mempertimbangkan untuk memindahkan beberapa pos tarif dari kategori A15 ke kategori A3 – A7 sebagaimana disarankan oleh Kementerian Perdagangan. Langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia menyesuaikan parameter baru untuk eliminasi gradual, 10 – 15 tahun (A10 – A15) maksimal 21%. Hasil perundingan putaran ke-5 tanggal 22 - 24 Juli 2024 di kota Batu, Malang. sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kedua pihak telah menyepakati <i>draft text Trade in Goods</i>. Kedua pihak telah menyepakati hal-hal mengenai struktur pada



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p><i>Annex XX (Schedule of Commitment)</i> yaitu Indonesia dan EAEU sepakat menggunakan pendekatan tahunan untuk <i>Schedule of Commitment</i>, serta menggunakan draft <i>Annex</i> dan <i>General Notes</i> milik EAEU sebagai dasar untuk diskusi lebih lanjut.</p> <p>3. Mengenai <i>Schedule of Commitment</i>, kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan pengurangan tahunan. Pendekatan Indonesia adalah melaksanakan pengurangan tahunan pada tanggal 1 Januari setiap tahun berikutnya, sedangkan EAEU mengusulkan untuk melaksanakannya setiap dua belas bulan sejak tanggal Perjanjian ini berlaku. Kedua belah pihak akan berkonsultasi secara internal dan akan memberikan tanggapan.</p> <p>4. Kedua pihak telah bertukar <i>2nd offers</i> pada 24 Juli 2024 dengan tingkat liberalisasi sebesar 80.5% dengan ketidakseimbangan tingkat liberalisasi di setiap kategori. Untuk menyeimbangkan penawaran, kedua belah pihak menyetujui parameter baru sebagai berikut:</p>



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>1) <i>Elimination at entry into force (A)</i>: 26%</p> <p>2) <i>Elimination in 3-7 years (A3-A7)</i>: 27.5%</p> <p>3) <i>Elimination in 10-15 years (A10-A15)</i>: 21%</p> <p>4) <i>Other liberalization (Reduction, MoP, TRQ)</i>: 6%</p> <p>5. Selanjutnya, kedua pihak akan mengajukan penawaran yang telah direvisi sesuai dengan parameter baru pada 9 Agustus 2024 dan <i>priority request list</i> pada 23 Agustus 2024. <i>Priority request</i> akan fokus pada pos tarif di bawah kategori <i>exclusion</i> dan <i>non-elimination</i>, maksimal 5% dari nomenklatur tarif.</p>
		SPS	<p>Perundingan WG SPS dalam negosiasi IEAEU-FTA Putaran ke-5 membahas harmonisasi standar keamanan pangan, kesehatan hewan, dan perlindungan tumbuhan antara Indonesia dan <i>Eurasian Economic Union (EAEU)</i>. Fokus utama perundingan ini mencakup penyesuaian regulasi, pengakuan sistem sertifikasi, serta penyederhanaan prosedur perizinan dan karantina guna memperlancar perdagangan produk pertanian dan pangan. Dalam diskusi, berbagai kendala teknis seperti batasan residu pestisida dan standar kesehatan hewan turut dibahas untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.</p>



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>Saat ini IEAEU-FTA telah berhasil diselesaikan dengan kesepakatan akhir mengenai harmonisasi standar keamanan pangan, kesehatan hewan, dan perlindungan tumbuhan antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU). Seluruh pihak telah menyetujui mekanisme pengakuan sistem sertifikasi, penyederhanaan prosedur perizinan dan karantina, serta langkah-langkah teknis untuk mengatasi hambatan perdagangan produk pertanian dan pangan. Dengan tercapainya kesepakatan ini, kerja sama perdagangan antara Indonesia dan EAEU diharapkan semakin lancar, membuka peluang akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak.</p>
	Indonesia-Peru CEPA	NTMA	<p>BPOM menyampaikan masukan terhadap pos tarif, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tgl 8 Juli 2024 - BPOM menyampaikan bahwa pos tarif yang masuk ke dalam binaan BPOM adalah sebanyak 126 pos tarif dari total 177 pos tarif yang disampaikan BKPerdag 2. Tgl 26 Agustus 2024 - BPOM menyampaikan <i>improved offer</i> berupa perubahan kategori modalitas untuk 21 pos tarif binaan BPOM. Namun, terdapat kesalahan dalam data rekap masukan K/L, dimana untuk pos tarif 2940.00.00 seharusnya masuk ke dalam kategori NT1 bukan EIF.



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>3. Tgl 11 September 2024 - Persentase Masukan BPOM Riil adalah 70,62% yang diperoleh dari pembagian Masukan BPOM Riil (125) terhadap jumlah pos tarif binaan BPOM sebanyak 177 (menurut BKPerdag).</p> <p>4. Tgl 16 September 2024 - berdasarkan analisis BPOM terhadap data rekap yang diberikan, liberalisasi BPOM sudah mencapai 92,86% (Perhitungan diperoleh dari 117/126 Kode HS binaan BPOM), sehingga BPOM sudah tidak dapat memberikan rekomendasi improved offer karena sudah memenuhi komitmen liberalisasi lebih dari 85%.</p> <p>5. Selain itu, BPOM juga menyetujui masukan BKPerdag terhadap skema modalitas pos tarif BPOM yang beririsan dengan K/L lain, yaitu sebanyak 32 pos tarif, dimana 31 pos tarif sudah liberalisasi (EIF sebanyak 26 pos tarif; NT1 sebanyak 1 pos tarif, dan NT2 sebanyak 4 pos tarif), dan hanya menyisakan 1 kategori EX yaitu 2936.27.00 (Desc: - - Vitamin C and its derivatives) karena termasuk ke dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) hingga tahun 2035.</p> <p>Hasil Perundingan IP-CEPA Putaran Ketiga, yaitu:</p> <p>1. Indonesia menegaskan komitmen untuk mencapai target liberalisasi sebesar 85% pada Putaran Keempat.</p>



KSHM



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			<p>Meskipun pada putaran ketiga ini Indonesia belum dapat mencapai liberalisasi 85%.</p> <p>2. Dalam hal ini, pos tarif komoditi binaan BPOM sudah melebihi target liberalisasi 85% dengan mencapai liberalisasi sebesar 92,86% berdasarkan perhitungan 117 dari 126 Kode HS binaan BPOM.</p> <p>3. Kedua pihak menyetujui 3 (tiga) pasal dan 16 ayat pada draf teks.</p>
		TBT	<p>Hasil Perundingan IP-CEPA Putaran Ketiga, yaitu:</p> <p>1. Terkait dengan pasal X.5 <i>International Standards</i>, Indonesia menyampaikan usulan yaitu untuk membagi pasal menjadi 2 pasal yang berbeda, yaitu <i>standards</i> dan <i>international standards</i>. Usulan tersebut diambil <i>based on RCEP Text Agreement</i>. Peru menyampaikan akan melakukan konsultasi internal terlebih dahulu dengan pihak terkait.</p> <p>2. Terhadap pasal X.7 <i>Conformity Assessment</i>, BPOM juga menyampaikan bahwa semua hasil pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat harus diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasi.</p> <p>3. Perundingan ketiga WG TBT Indonesia - Peru telah menyelesaikan 10 (sepuluh) pasal dan masih terdapat 4 (empat) pasal yang masih menunggu kesepakatan.</p>
5	Indonesia-GCC FTA	TIG dan SPS	Pada perundingan putaran kedua, Indonesia dan GCC berhasil mencapai kesepakatan pada sanitari dan fitosanitari.



K S H M



BADAN POM

2024

No	CEPA	Working Group	Isu yang dibahas
			Indonesia dan GCC berhasil mencapai kesepakatan padasanitari dan fitosanitari. Di sisi lain, dalampembahasan teks lainnya, kedua pihak mencapai kemajuan signifikan dengan capaian 45 persen untuk 16 isu runding lainnya dalam kerangka I-GCC FTA
6	Indonesia-Mauritius PTA	<i>Market Access</i>	BPOM telah menyampaikan Masukan Usulan Pos Tarif pada <i>Initial Offer List</i> Pos Tarif Produk Binaan BPOM.

- c) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, CoRE Duke-NUS Singapura, Austrade, Australian Government, United States Pharmacopeia (USP), pertemuan bilateral antara Kepala BPOM dengan Menteri Kesehatan Sudan tanggal 3 September 2024, Pertemuan Kepala BPOM RI dengan Duta Besar Amerika Serikat pada 6 Desember 2024, Pertemuan Kepala BPOM dengan Inspektur Jenderal AIFAESA, I.P. Timor-Leste pada 11 Desember 2024, dll;
- d) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan dengan ADB dan CoRE-DukeNUS tanggal 26 Januari 2024, pertemuan virtual dengan CoRE Duke NUS dan The Asian Development Bank (ADB) (29 Februari 2024, 10 Juni 2024, 5 Juli 2024), Pertemuan Plt. Kepala BPOM dengan CEO United States Pharmacopeia (USP) tanggal 25 Januari 2024, Pertemuan dengan Australian Trade and Investment Commission (Austrade) tanggal 19 Maret 2024, Pertemuan virtual dengan Thai FDA terkait kerja sama e-certificate tanggal 7 Juni 2024; penyusunan Usulan Kegiatan dalam Grant Agreement JWP Biennium 2024-2025, dll;
- e) Pertemuan dengan *National Codex Committee Timor-Leste* tanggal 26 Agustus 2024



K S H M



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

- f) FGD Strategi Diplomasi Ekonomi dalam Kemitraan Multilateral dan Bilateral untuk Meningkatkan Akses Obat dan Vaksin Indonesia di Negara Anggota OKI tanggal 22 Maret 2024;
- g) Penandatanganan dokumen kerja sama dengan mitra luar negeri antara lain MoU antara BPOM dengan CoRE Duke NUS Singapura tanggal 26 April 2024, Penandatanganan MoU antara BPOM dengan TMDA Tanzania tanggal 3 September 2024;
- h) Partisipasi aktif BPOM pada forum internasional seperti PMDA-ASEAN Reliance Meeting tanggal 22 April 2024 di Jepang dan 2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS) pada tanggal 13 – 14 Mei 2024 di Seoul, Korea Selatan, Pertemuan Teknis dan Sidang ke-26 Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat Negeri Sabah, *International Symposium for Asia Regulatory Coordination*, Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, Perundingan Putaran Ketiga Indonesia–Peru CEPA tanggal 17 – 20 September 2024, dll;
- i) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama pada *Working Group Intellectual Property Rights Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* putaran ke-16, Working Group Sanitary and Phytosanitary (SPS) Perundingan Perdagangan *Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)*, dll;
- j) Penyusunan dan penyampaian posisi BPOM pada forum kerja sama regional pada 6th ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings, The 28th Meeting Of The Asean Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), 5th Round ACFTA Upgrading Negotiations 3.0, ATIGA Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (ATIGA WG-SPS), ASEAN Trade in Goods Agreement upgrading Trade Negotiating Committee (ATIGA TNC) ke-9, ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (AHPFS) ke-9, 7th ATIGA WG-SPS, 5th ACFTA WG SPS Meeting, ACTLC ke-22, ACC ke-38, AANZFTA SC-SPS, The 37th ACCSQ-PPWG Meeting, The 35th ACCSQ TMHSPWG Meeting, ATF-JCC ke-29, Task Force on ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF), ASEAN Rapid Alert System on Food and Feed (ARASFF), ASEAN-Canada Free Trade



K S H M



BADAN POM

2024

Agreement (ACAFTA), Regional Workshop on Consumer Participation Empowerment, Pertemuan ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Trade in Goods, Pertemuan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiation, Pertemuan Task Force on ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement, Pertemuan Intersesi ACC ke 37, 39th PFPWG and its related meeting, 8th ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety, 38th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - Pharmaceutical Products Working Groups (38th ACCSQ-PPWG), The 36th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group (36th ACCSQ TMHS PWG), dll;

- k) Penyusunan *statement* atau intervensi, dan penyampaian posisi BPOM pada pertemuan dalam forum kerja sama multilateral seperti WHO *Executive Board* (EB), *Steering Committee* dan *Plenary Meeting of WHO Member States Mechanism of Substandard and Falsified Medical Product* (MSM SFMP), Annual Meeting of WHO *International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines* (IRCH) Network, *Steering Group Meeting* dan *Meeting of the Assembly of the Member of the WHO South-East Asia Regulatory Network* (SEARN), Rapat Pembahasan Peningkatan Status Keanggotaan BPOM pada Forum *International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical for Human Use* (ICH)/*International Pharmaceutical Regulators Programme* (IPRP), *OIC National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) Meeting*, Sidang *Codex Committee on Contaminants in Foods* (CCCF) ke-17, Sidang *Codex Committee on Food Additives* (CCFA) ke-54, Sidang *Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses* (CCNFSDU) ke-44, Sidang *Codex Committee on Food Labelling* (CCFL) ke-48, Pertemuan *Trade Policy Review* (TPR) ke-6 Maroko, Pertemuan TPR ke-6 Islandia, Pertemuan TPR ke-12 Kanada, Pertemuan TPR ke-9 RRT, Pertemuan TPR ke-1 Kazakhstan, Pertemuan TPR ke-4 Brunei Darussalam, Pertemuan TPR ke-4 Kepulauan Solomon, Sidang Komite SPS WTO, Sidang Komite TBT WTO, Pertemuan *TRIPS Council*, *World Water Forum* (WWF) ke-10 "*Water for Shared Prosperity*", *Workshop Proses Akses Organisasi of Economic Co-operation and Development* (OECD) Indonesia, dll;



KSHM



BADAN POM

2024

- l) Penyusunan *statement* atau intervensi, dan penyampaian posisi BPOM pada pertemuan dalam forum kerja sama multilateral dalam bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
1	WHO <i>Executive Board</i> ke-156	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap forum MSM SFMP yang menunjukkan bahwa mekanisme money dapat meningkatkan keterlibatan aktif Negara Anggota dalam forum MSM. • Pemanfaatan <i>Global Surveillance and Monitoring System</i> (GSMS) oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan yang merupakan langkah strategis dalam melaporkan berbagai isu kritis,
2	WHO <i>Steering Committee</i> dan <i>Plenary Meeting of MSM on SFMP</i> ke-13	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi independen yang dilakukan untuk menilai dampak, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi oleh MSM selama ini. • Keberlanjutan pembiayaan untuk memastikan keberhasilan program-program MSM di masa depan. • Pemanfaatan <i>Global Surveillance and Monitoring System</i> (GSMS) yang merupakan langkah strategis dalam melaporkan berbagai isu kritis.
3.	<i>15th Annual Meeting of WHO IRCH Network</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi, keamanan, khasiat dan mutu obat tradisional yang ada di beberapa negara anggota IRCH. • Farmakope herbal yang digunakan oleh beberapa negara yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menyusun <i>International Herbal Pharmacopoeia</i> (IHP).
4.	<i>Steering Group</i> dan <i>Meeting of the Assembly of the Member of the WHO South-East Asia Regulatory Network (SEARN) 2024</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>Regulatory Center of Excellence(s)</i> (RCOE). • Draft MoU yang melibatkan negara anggota SEARN. • <i>Action plan</i> terbaru terkait AMR, Shortages, dan <i>Regulatory Information Management System</i> (RIMS), serta pembentukan WG6 <i>Traditional Products</i>.
5.	Status Keanggotaan BPOM pada ICH/IPRP.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan yang meliputi kontribusi dua orang <i>experts</i> dari BPOM dalam <i>Working Group</i> (WG) serta kehadiran BPOM pada <i>assembly meeting</i> ICH sebanyak tiga kali dalam dua tahun berturut-turut. • Penyusunan analisis <i>cost & benefit</i> mengingat besaran biaya keanggotaan yang



KSHM



BADAN POM

2024

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
		<p>cukup signifikan, yaitu sebesar 20.500 USD per tahun atau sekitar 330 juta rupiah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pedoman ICH, terutama pada kriteria tier 1 dan tier 2.
6.	<i>The 3rd OIC National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas regulator dalam memastikan akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan efektif. • Kemitraan strategis dengan akademisi untuk mendorong inovasi, memperkuat pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan daya saing regulasi nasional di sektor kesehatan. • Sinergi negara anggota OKI dalam menghadapi tantangan global, termasuk kesenjangan akses obat dan vaksin, dengan berbagi pengalaman dan <i>best practices</i> demi memastikan masyarakat OKI mendapat produk kesehatan yang aman dan berkualitas.

m) Penyusunan dan penyampaian posisi BPOM pada forum kerja sama multilateral dalam bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
1	Sidang Komite SPS WTO ke-89	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan produk Mi Instan asal Indonesia yang dianggap mengandung residu pestisida Etilen Oksida (EtO) di Singapura, Hongkong, Taiwan dan Malaysia • Hambatan Ekspor Produk <i>Composite</i> Indonesia ke Uni Eropa
2	Sidang Komite TBT WTO	<ul style="list-style-type: none"> • STC diangkat China kepada Indonesia mengenai sistem baru untuk sertifikasi kosmetik oleh BPOM • Pertemuan Bilateral Indonesia dengan Taiwan mengenai penolakan ekspor pangan olahan Indonesia ke Taiwan dan notifikasi peraturan Taiwan mengenai pelarangan tembakau di Taiwan
3	Sidang CCFA ke-54	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Indonesia untuk menurunkan batas maksimal karamel iv sulfit amonia proses dari 25000 mg/kg menjadi 1200 mg/kg disetujui oleh CCFA ke-54 untuk diteruskan kepada CAC ke-47 agar dapat diadopsi pada step 8 dan 5/8. • Sidang CCFA ke-54 menyepakati <i>discussion</i>



KSHM



BADAN POM

2024

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
		<i>paper</i> terkait <i>baker's yeast</i> untuk diajukan kepada CAC ke-47 sebagai new work dan membentuk eWG yang dipimpin oleh China dibantu oleh Perancis dan Turki menyiapkan rancangan standar <i>baker's yeast</i> untuk disirkulasikan kepada negara anggota codex guna mendapatkan masukan.
4	World Water Forum (WWF) ke-10	B POM melakukan pengawalan keamanan pangan di lokasi <i>venue</i> dan sekitarnya
5	Pertemuan TPR ke-6 Maroko	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi perdagangan Indonesia-Maroko produk Obat dan Makanan • Hambatan Ekspor Produk Pangan Olahan Indonesia ke Maroko • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Maroko untuk produk Obat dan Makanan
6	Pertemuan TPR ke-6 Islandia	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hubungan dagang Indonesia dengan Islandia untuk produk ONPP dan Pangan Olahan • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Islandia untuk produk untuk produk ONPP dan Pangan Olahan • Dampak Kebijakan/Peraturan Islandia terkait Pangan Olahan bagi Indonesia
7	Pertemuan TPR ke-12 Kanada	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hubungan dagang Indonesia dengan Kanada untuk produk ONPP dan Pangan Olahan • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Kanada untuk produk untuk produk ONPP dan Pangan Olahan • Dampak Kebijakan/Peraturan Kanada terkait Pangan Olahan bagi Indonesia
8	Pertemuan TPR ke - 9 RRT	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hubungan dagang Indonesia dengan RRT • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di RRT • Kebijakan/peraturan RRT yang saat ini telah diberlakukan
9	Pertemuan TPR ke-1 Kazakhstan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan Kazakhstan • Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Kazakhstan

No	Forum/Pertemuan	Isu yang dibahas
10	Pertemuan TPR ke - 4 Brunei Darussalam	<ul style="list-style-type: none"> Informasi hubungan dagang Indonesia dengan Brunei Darussalam Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Brunei Darussalam Kebijakan/peraturan Brunei Darussalam
11	Pertemuan TPR ke-4 Kepulauan Solomon	<ul style="list-style-type: none"> Informasi hubungan dagang Indonesia dengan Kepulauan Solomon Upaya peningkatan akses pasar Indonesia di Kepulauan Solomon Kebijakan/peraturan Kepulauan Solomon

3.2. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

SK2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 3	Indeks kepuasan media
IKK 4	Indeks opini publik BPOM
IKK 5	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas

3.2.1 IKK 3: Indeks kepuasan media

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	F	g	$h=(g/fx100)$
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	77,13	78,37	101,61%	237.108	237.086	99,99%

Realisasi Indikator kinerja yang ketiga, yaitu “Indeks Kepuasan Media” pada Tahun 2023 adalah **78,37%** dari target sebesar 77,13%, sehingga capaian indikator adalah **101,61%** dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” (Hijau).



KSHM



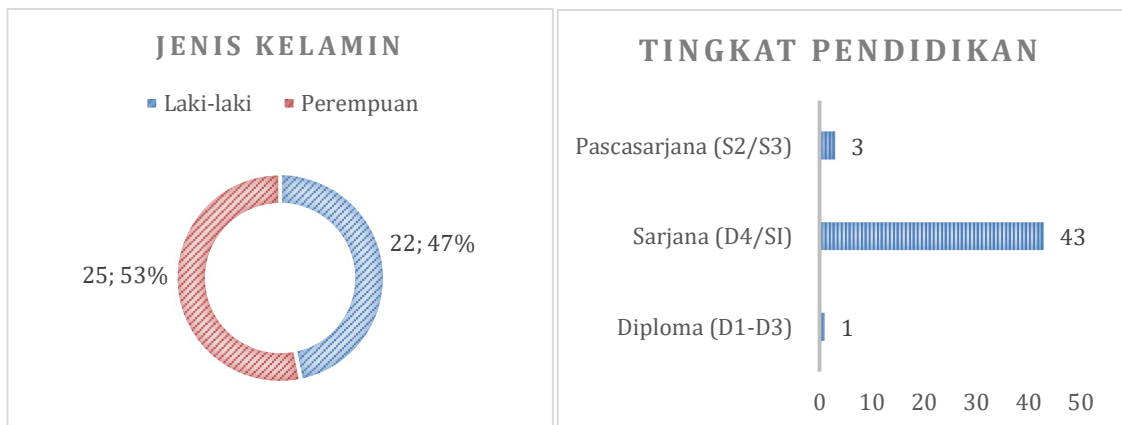
BADAN POM

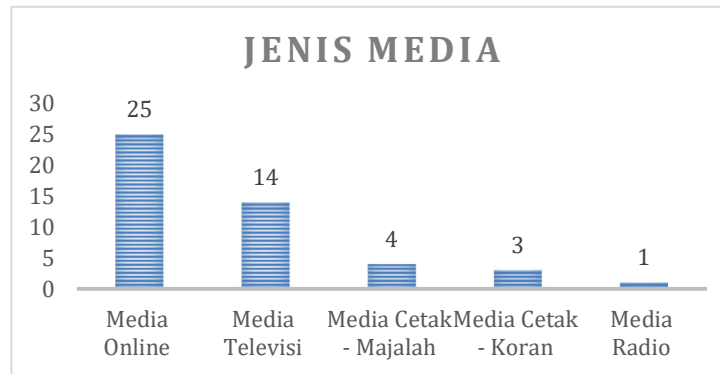
Pada tahun 2023, pagu anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp237.108.500,- dengan realisasi sebesar Rp237.086.264,- (99,99%)

Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Media” diperoleh melalui pengukuran yang dilakukan di akhir tahun 2024. Survei kepuasan media yang dilakukan tidak hanya untuk mengukur nilai indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM melalui kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/*talkshow*.

Pengukuran Indeks dilakukan dengan 9 (sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan indikator tersebut yaitu sistem, mekanisme, dan prosedur; persyaratan pelayanan; biaya/tarif; waktu; produk; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana prasarana; serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Media tahun 2024 melibatkan 47 wartawan yang pernah mendapatkan pelayanan kehumasan dari BPOM selama periode November 2023–Oktober 2024, baik melalui peliputan kegiatan strategis di BPOM, pengajuan permohonan narasumber wawancara/*talkshow*, pelaksanaan konferensi pers, atau kegiatan komunikasi dan pertemuan media lainnya. Profil responden dapat dilihat melalui grafik berikut:





Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap BPOM Tahun 2024

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Telesurvey melalui telepon berdasarkan database yang diberikan oleh Tim BPOM. Metode telesurvey ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Sigma Research Indonesia.
2. Pengisian Angket Daring atau *Web Assisted Personal Interviewing* (WAPI) secara mandiri. Metode ini dilakukan oleh Tim Sigma Research Indonesia yang mengirimkan tautan kuesioner daring kepada responden.
3. *Focus group discussion* (FGD), yang terdiri dari FGD Eksternal dan FGD internal. FGD Eksternal dilakukan untuk memperdalam informasi dari hasil kuantitatif. FGD eksternal dibagi ke dalam dua kelompok yaitu (1) Responden yang memiliki nilai indeks kepuasan 3,00–4,00 dan (2) Responden yang memiliki nilai indeks di bawah 3,00.

Indeks kepuasan media tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,24 poin dibandingkan tahun 2023. Di sisi lain, indeks harapan tahun 2024 juga mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan hanya sebesar -0,90 poin. Hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan media. Indeks tertinggi diperoleh pada unsur sarana dan prasarana dengan nilai 94,75 dan indeks terendah pada unsur waktu penyelesaian dan penanganan pengaduan dengan nilai 73,4.



Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan Media Tahun 2021-2024

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas pelayanan liputan, serta pemenuhan terhadap permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM setara dengan pelayanan dari instansi lain;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- Perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan media; dan
- Kemudahan memahami informasi yang disampaikan BPOM (melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos).

Beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan BPOM terkait pelaksanaannya.
- Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM kepada media, sehingga media selalu ter-update dengan informasi yang dikeluarkan BPOM.
- Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan BPOM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat.



Dalam kegiatan ini, dapat disediakan sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan BPOM untuk pembahasan isu tersebut; dan

- d. Permohonan wawancara yang diajukan terkait topik obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat direspons dalam bentuk pelaksanaan konferensi pers/*doorstop*/wawancara/jawaban tertulis sehingga mempercepat penyampaian informasi kepada media.

Berdasarkan analisis hasil survei dari setiap komponen, terdapat beberapa saran dan masukan perbaikan dari responden jurnalis yang perlu menjadi prioritas perbaikan layanan kehumasan BPOM, yaitu:

- a. Mempermudah akses wawancara dengan narasumber terutama pada Deputi dan Kepala BPOM.
- b. Mengizinkan jurnalis untuk mengutip nama dan jabatan dari narasumber ketika menulis berita. Hal ini masih menjadi perhatian jurnalis karena ada beberapa narasumber yang enggan untuk menggunakan nama dan jabatannya dengan alasan yang bisa dikutip hanya biro humas atau kepala BPOM.
- c. Mengadakan pertemuan setiap bulannya untuk membahas terkait isu-isu terkini dengan media.
- d. Meningkatkan kualitas dari narasumber (ketersediaan jadwal kegiatan yang jelas, kesesuaian janji meeting, memperbanyak opsi narasumber).
- e. BPOM harus memiliki juru bicara atau kepala humas yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi ke media. Hal ini untuk menghindari saling lempar antar petugas ketika jurnalis sedang mencari informasi.
- f. Menyediakan data dan informasi yang terkini. Data dapat dipublikasikan melalui kanal media internal BPOM ataupun melakukan pengarsipan dokumentasi di setiap kegiatan BPOM baik yang di pusat dan daerah-daerah.
- g. BPOM perlu memperbaiki proses pencatatan data yang berkaitan dengan obat, makanan, suplemen, dan lain-lain. Jurnalis masih merasa bahwa BPOM belum bisa memberikan pelayanan data yang baik bagi mereka.

3.2.2 IKK 4: Indeks Opini Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks opini publik BPOM	85,10	85,19	100,11 %	3.682.376	3,682.206	100%

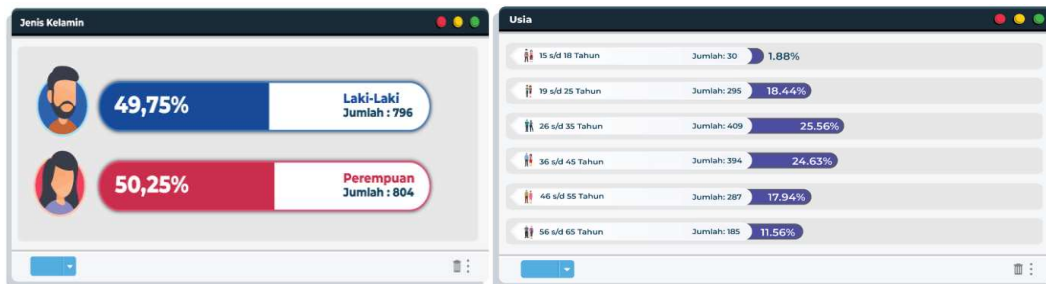
Realisasi Indeks Opini Publik BPOM pada tahun 2024 adalah sebesar 85,19 dari target sebesar 85,1, sehingga capaian indikator adalah 100,11% dengan kategori “Baik” (Hijau). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3.682.376.000 dengan realisasi Rp3.682.206.175 (100%). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 3.682.376.000 dengan realisasi Rp 3.682.206.175 (100%).

Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap BPOM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative and Qualitative Research*. Survei dilakukan tiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor berpengaruh pada kepercayaan tersebut. Pada 2024 melanjutkan pengukuran indeks opini publik seperti tahun sebelumnya. Survei ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPOM serta dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi komunikasi publik BPOM dalam menyampaikan informasi dan kebijakan BPOM.

Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 responden, dengan *margin of error* sebesar 2,45 menggunakan rumus Krejcie and Morgan, dan 2,50% menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan *margin of error* dari 1.600 responden yang menjadi sampel ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil Indeks Opini Publik yang dihasilkan dari 1.600 sampel penduduk dapat mewakili karakteristik populasi penduduk Indonesia dengan

tingkat kepercayaan (*confidence level*) sebesar 95%, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa indeks opini publik terhadap BPOM tahun 2024 secara Nasional. Pada setiap rumah tangga terpilih, akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut.

Karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 804 orang (50,25%), sedangkan laki-laki berjumlah 796 orang (49,75%). Dari segi usia, sebagian besar responden berada dalam rentang usia 26–35 tahun sebanyak 409 orang (25,56%), diikuti oleh kelompok usia 36–45 tahun dengan 394 orang (24,63%), dan usia 19–25 tahun sebanyak 295 orang (18,44%). Kelompok usia 15–18 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya 30 orang (1,88%). Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin disajikan pada Gambar di bawah ini.



Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Indeks Opini Publik BPOM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: BPOM melakukan pengawasan *pre* dan *post-market* serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: BPOM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: BPOM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: BPOM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: BPOM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan.



K S H M



BADAN POM

2024

6. Aspek Isu Obat dan Makanan: BPOM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan.

Hasil Survei Opini Publik terhadap BPOM tahun 2024 menunjukkan bahwa publik sudah sangat percaya terhadap kinerja yang dilakukan BPOM. Seluruh parameter dan aspek yang menjadi bahan penilaian opini publik telah masuk dalam kategori “Sangat Percaya” dengan nilai di dalam interval 80,01–90,00. Dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, nilai Indeks Opini Publik terhadap BPOM tahun 2024 merupakan nilai indeks tertinggi dengan peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 0,15 poin. Meskipun demikian, aspek kesehatan dan aspek peraturan mengalami penurunan dari tahun 2023 masing-masing sebesar 0,48 dan 0,69 poin

Beberapa upaya yang telah dilakukan di tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a. Meningkatkan publikasi informasi publik BPOM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat. Informasi yang tepat dan tepercaya dari BPOM akan membentuk kepercayaan masyarakat yang baik dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM.
- b. Mengembangkan berbagai inovasi terkait dengan publikasi informasi kepada masyarakat dengan membuat berbagai jenis konten yang disesuaikan dengan *public needs* seperti konten *video/reels*.
- c. Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun *talkshow*.
- d. Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah maupun tokoh yang berpengaruh untuk bersama-sama mendukung pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- e. Menyebarkan informasi kekinian terkait obat dan makanan, dan kinerja BPOM dalam bentuk audio visual seperti *podcast* melalui kanal media sosial BPOM.

3.2.3 IKK 5: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	D
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,89	3,89	100%	179.314	179.308	100%

Realisasi Indikator kinerja yang kelima, yaitu “Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah 3,89 dari target Tahun 2024 sebesar 3,89, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 179.314.800 dengan realisasi Rp 179.308.814 (100%).

IKK 5 ditujukan untuk mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Biro Kerja Sama dan Humas terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Biro Kerja Sama dan Humas. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas.



K S H M



BADAN POM

2024

Survey mengukur kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang mencakup:

1. Layanan Penyusunan MoU/PKS dalam negeri
2. Layanan Penyusunan MoU/PKS luar negeri
3. Layanan Penyusunan Bahan Kerja Sama Luar Negeri (Kertas Posisi, *Talking Point*, dll)
4. Layanan Administrasi/Persetujuan dan Exit Permit Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Layanan Export Consultation Desk (ECD)
6. Layanan Monitoring Pemberitaan terkait Obat dan Makanan
7. Layanan Permintaan Peliputan Kegiatan Strategis BPOM
8. Layanan Publikasi Kegiatan Strategis BPOM pada Media Sosial Resmi BPOM, dan
9. Layanan Permohonan Wawancara dari Media

Berdasarkan nilai IPP, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama dan Humas sebesar 3,89, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sudah tercapai.

Kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang pencapaian IKK5, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
- b. Sosialisasi Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT;
- c. Asistensi dan pembinaan kerja sama dalam negeri;
- d. Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis BPOM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM, terutama yang melibatkan Kepala BPOM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial official BPOM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebar ke media.
- e. Monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri melalui subsite SIKES.
- f. Pelaksanaan inovasi sarana pelayanan publik Biro Kerja Sama dan Humas melalui kegiatan KONEKSI (Konsultasi, mONitoring, dan Evaluasi Kerja

- Sama dalam negeri). KONEKSI diadakan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis secara daring melalui aplikasi Zoom;
- g. Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang obat dan makanan di media cetak, elektronik dan *online* secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari BPOM.
 - h. Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di BPOM melalui berbagai akun *official* media sosial BPOM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
 - i. Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
 - j. Peningkatan kompetensi petugas kehumasan di lingkungan setama melalui Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM Camp) dan *Meet the Expert*.

3.3. Sasaran Kegiatan 3. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

SK3. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM

IKK 6 Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

3.3.1. IKK 6: Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	B	c	d	a	b	c	d
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88	90,46	102,79%	378.452	378.367	99,98%

Realisasi Indikator kinerja yang keenam, yaitu “Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu” di Tahun 2024 adalah 90,46% dari target Tahun 2024 sebesar 88%, sehingga capaian indikator adalah 102,79% dengan kriteria



“Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 378.452.000 dengan realisasi Rp 378.367.048 (99,98%).

Indikator Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator level *internal process* untuk melihat sejauh mana dokumen kerja sama yang berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penjajakan kerja sama (talking point, statement), perjanjian kerja sama yang difasilitasi oleh Biro Kerja Sama dan Humas dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SLA di SOP Makro.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK6, antara lain:

- a. Melakukan tinjau ulang SOP disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pembahasan bersama, dll.
- c. Menyusun pedoman kerja sama dan pengembangan aplikasi terkait.

Dalam forum bilateral, telah dilaksanakan penandatanganan MOU dengan Mitra di luar Negeri, seperti antara BPOM dan CoRE Duke NUS Singapura tanggal 26 April 2024, *Exchange of Letters Colaboration between BPOM-TGA under RSP*, BPOM dengan TMDA Tanzania tanggal 3 September 2024, dan lainnya.

Rincian dokumen kerja sama dalam negeri yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sebagai berikut:

NO	DOKUMEN KERJA SAMA DALAM NEGERI
1	MOU antara BPOM dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2	MOU antara BPOM dengan Badan Intelijen Negara
3	MOU antara BPOM dengan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI)
4	MOU antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPOM dan Badan Pangan Nasional
5	PKS antara BPOM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
6	MOU antara BPOM dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
7	PKS antara BPOM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)



KSHM



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

NO	DOKUMEN KERJA SAMA DALAM NEGERI
8	PKS antara BPOM dengan Badan Pusat Statistik
9	PKS antara BPOM dengan PT. Tentang Anak Bahagia
10	PKS antara BPOM dengan PT. Pos Indonesia
11	PKS antara BPOM dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI
12	MOU antara BPOM dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES)
13	MOU antara BPOM dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
14	PKS antara BPOM, BRIN, dan Kementerian Kesehatan
15	PKS antara BPOM dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)
16	PKS antara BPOM dengan PT Bank Mandiri Tbk
17	MOU antara BPOM dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18	PKS antara BPOM dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
19	PKS antara BPOM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
20	PKS antara BPOM dengan Balai Besar Kimia Farmasi dan Kemasan Kementerian Perindustrian, Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu UGM, Laboratorium Terpadu IPB, PT Akurat Spektra Prima dan PT Vicma Lab Indonesia
21	MOU antara BPOM dengan Institut Pertanian Bogor
22	MOU antara BPOM dengan Lembaga Administrasi Negara
23	MOU antara BPOM dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
24	MOU antara BPOM dengan Kementerian Dalam Negeri
25	MOU antara BPOM dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
26	MOU antara BPOM dengan PT Telkom Indonesia, Tbk.

3.4. Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

SK4. Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

IKK 7	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan
-------	---

3.4.1 IKK 7: Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2	2	100%	952.177	952.177	99,99%

Realisasi Indikator kinerja yang ketujuh, yaitu “Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah 2 Negara dari target Tahun 2023 sebesar 2 Negara, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 952.177.000 dengan realisasi Rp 952.071.402 (99,99%).

Indikator Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan merupakan indikator level internal process untuk melihat Negara Selatan-selatan yang merupakan negara berkembang diberikan kontribusi oleh BPOM dalam pembangunan nasional. Ruang lingkup indikator ini antara lain:



K S H M



BADAN POM

2024

1. Penyelenggaraan Knowledge Sharing;
2. *Business Meeting*; atau
3. Kunjungan Kerja.

Beberapa hal yang mendukung realisasi pada IKK7, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait di BPOM dalam penyusunan materi peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk negara penerima KSS BPOM.
- c. Penyusunan telaah, kajian serta usulan/rekomendasi terkait kerja sama selatan-selatan.

Kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. **BPOM telah menyelenggarakan program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Palestina tahun 2024 di Amman, Yordania pada tanggal 20-23 Mei 2024.** Program pelatihan ini diberikan kepada pejabat Kementerian Kesehatan Palestina dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam bidang pengawasan obat dan keamanan pangan dalam rangka pembentukan otoritas regulator obat dan makanan Palestina yang mandiri.
2. Kegiatan ini diselenggarakan dengan lancar dan dihadiri secara luring oleh 15 peserta dari Kementerian Kesehatan Palestina yang terdiri dari 6 regulator di bidang obat dari General Directorate of Pharmacy dan 9 regulator pangan yang terdiri dari Nutrition Department - Public Health (3 peserta) dan Environmental Health Dept - Public Health (6 peserta).
3. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala BPOM secara virtual yang menekankan bahwa Program KSS ini merupakan wujud nyata dari dukungan Indonesia untuk Palestina, khususnya dalam membangun Otoritas Regulator Obat dan Makanan yang kuat dan mandiri. Kerja sama ini ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan tim dari Kementerian Kesehatan Palestina sehingga memiliki kompetensi tinggi dalam memastikan keamanan, kualitas, dan manfaat dari produk obat dan makanan di Palestina.

4. Pada bulan Juli 2024, BPOM telah menyelenggarakan program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), yaitu *Capacity building Project for Strengthening the Inspection, Regulatory, and Coordinating Function bagi pejabat dan staf Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)*. Kegiatan ini ditujukan untuk kapasitas dari staf BSFA dengan berkerja antara BPOM, JICA dan IPB.
5. Selain itu, di pada tanggal 21 Oktober 2024 telah dilaksanakan evaluasi kegiatan KSS BPOM periode 2020-2024 yang turut mengundang Kementerian Luar Negeri, LDKPI, dan KBRI. Rapat ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program KSS yang telah dilaksanakan serta membahas rencana program di tahun 2025-2029.

3.5. Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

SK5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 8	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media
IKK 9	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti
IKK 10	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting

3.5.1. IKK 8: Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,96	100,10%	3.181.056	3.180.720	99,99

Realisasi indikator “Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media” tahun 2024 adalah 99,96% dari target tahun 2024 sebesar 99,86%, sehingga capaian indikator adalah 100,10% dengan kategori “Sangat Baik”. Alokasi anggaran untuk mendukung



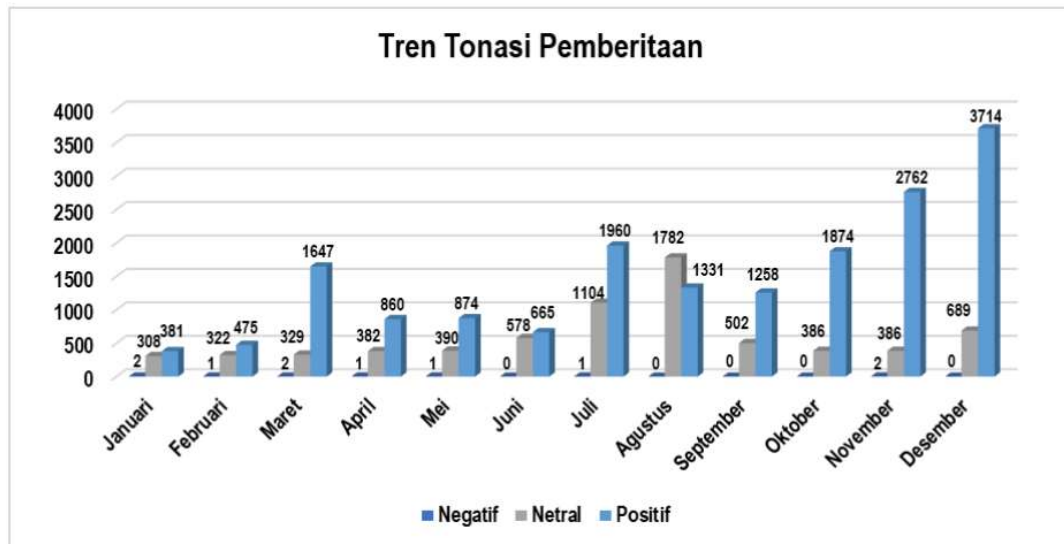
pencapaian indikator adalah Rp3.181.056.000 dengan realisasi Rp3.180.720.281 (99,99%).

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tonasi positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan tonasi netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan BPOM saja. Selanjutnya terdapat berita dengan tonasi negatif, yakni berita terkait BPOM yang mengkritik atau menyudutkan BPOM, baik dari kinerja, pelayanan, atau kebijakan BPOM, namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tonasi positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%.

Pada periode tahun 2024, pemberitaan terkait obat dan makanan secara umum dan BPOM sebanyak 24.969 berita. Pemberitaan tersebut terdiri atas 71,28% berita bertonasi positif (17.798 berita), 28,68% berita bertonasi netral (7.161 berita), dan 0,04 % berita bertonasi negatif (10 berita). Perhitungan indikator ini berdasarkan akumulasi pemberitaan dari Januari–Desember.

Tonasi positif muncul dari berbagai pemberitaan kegiatan BPOM serta banyaknya pernyataan BPOM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik obat dan makanan yang tidak mengutip BPOM. Berdasarkan grafik dibawah, berita positif mengalami peningkatan tiap bulan bahkan pada Maret peningkatan tersebut 2 kali lipat dari jumlah bulan sebelumnya. Pada Juli dan Agustus kembali terjadi peningkatan signifikan untuk berita positif dan netral. Sedangkan berita negatif jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan berita positif dan netral.



Tren Tonasi Pemberitaan BPOM Tahun 2024

Pada bulan Januari, pemberitaan didominasi oleh pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai vaksin COVID-19 berbayar, kerja sama antara BPOM dengan Tanzania Medicine and Medical Authority untuk percepatan registrasi produk farmasi.

Pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh pemberitaan mengenai tanggapan produsen AMDK mengenai kandungan bromat, perayaan HUT BPOM RI, dan tanggapan BPOM mengenai kandungan bromat pada AMDK.

Pada bulan Maret, pemberitaan yakni seputar topik BPOM dan Bea Cukai Soekarno Hatta musnahkan *milk bun* hasil penindakan barang bawaan di Bandara Soekarno Hatta, dan suplemen kesehatan beni koji dari Jepang yang sebabkan gagal ginjal. Berita lain yang banyak muncul yaitu mengenai intensifikasi pengawasan pangan selama ramadan 1445 H yang dilakukan oleh seluruh UPT BPOM.

Pada bulan April, pemberitaan didominasi oleh BPOM sita 188.640 item produk pangan tidak penuhi syarat keamanan dan mutu yang beredar di pasaran selama pengawasan tahap IV periode Ramadan 1445 H.

Pada bulan Mei, isu mengenai efek samping vaksin AstraZeneca yaitu Thrombosis Thrombocytopenia Syndrome (TTS) mendapatkan respon dari BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). BPOM memastikan pemberian izin edar darurat 73 juta dosis vaksin AstraZeneca sudah melalui proses dan pemantauan ketat. BPOM juga memastikan saat ini vaksin COVID-19 AstraZeneca sudah tidak tersedia di Indonesia.

Pada bulan Juni, pemberitaan mengenai pembahasan legalitas daun kratom dan malpraktik vaksinasi imunisasi mencapai di atas 100 pemberitaan. Pada isu daun



K S H M



BADAN POM

2024

Laporan Tahunan Biro Kerja Sama dan Humas

kratom, Presiden Jokowi menginstruksikan Kemenkes, BRIN, serta BPOM untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait daun kratom. Pada isu mengenai malpraktik vaksinasi imunisasi, media memberitakan mengenai rekomendasi Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) untuk melakukan autopsi terhadap jasad bayi berinisial MKA yang dilaporkan meninggal di Sukabumi.

Pada bulan Juli, pemberitaan tentang isu adanya roti yang menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) kosmetik mencapai diatas 100 pemberitaan. Terlebih setelah BPOM mengadakan konferensi pers terkait kasus roti berpengawet kosmetik pada Kamis, 25 Juli 2024, yang mengungkapkan hasil pengawasan BPOM menunjukkan roti merek Okko menggunakan BTP yang tak sesuai, karena itu harus ditarik dari peredaran dan dihentikan produksinya. Pemberitaan juga diramalkan dengan pernyataan dari produsen roti Aoka, yang sebelumnya dicurigai mengandung BTP kosmetik, menegaskan produknya sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi.

Pada bulan Agustus, pemberitaan tentang BPOM didominasi oleh pelantikan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM menggantikan Kepala BPOM sebelumnya. Pelantikan Kepala BPOM oleh Presiden ini bersamaan dengan Pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional. Disebutkan dalam pemberitaan bahwa Pengangkatan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/PPA tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan BPOM.

Pada bulan September, tepatnya September akhir, pemberitaan tentang konferensi pers BPOM bersama Kementerian Perdagangan BPOM mencapai lebih 100 pemberitaan. Di bawah kerangka Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, BPOM dan Kementerian Perdagangan serta instansi lainnya berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp11,4 miliar. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa temuan kosmetik impor ilegal yang diamankan berjumlah 415.035 pieces (970 item). Kosmetik tersebut merupakan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang yang sebagian besar berasal dari negara Tiongkok, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Pada Oktober, pemberitaan didominasi oleh respons BPOM soal anggur shine muscat. Kepala BPOM Taruna Ikrar berjanji akan menindak lanjuti kegaduhan residu beracun yang diduga terdapat pada muscat. Hal ini menyusul otoritas pangan Thailand menemukan anggur shine muscat terkontaminasi residu melebihi batas aman. Taruna mengatakan BPOM akan langsung melakukan sampling ke pasar,

serta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait penemuan tersebut.

Pada November, pemberitaan didominasi oleh BBPOM di Makassar bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menarik 6 produk skincare berbahan merkuri dari pasaran. Kepala BBPOM di Makassar Hariani menjelaskan pihaknya akan berkolaborasi dengan dinas kesehatan maupun dinas perdagangan menindaklanjuti temuan 6 produk skincare berbahaya.

Pada Desember, pemberitaan didominasi oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar berbicara mengenai peran BPOM dalam membantu UMKM mengembangkan produk buataannya. Kerja sama yang terjalin antara Kementerian BUMN dengan BPOM dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM di skala global. Taruna menekankan pentingnya sertifikasi BPOM sebagai langkah awal untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator IKK8 ini antara lain:

1. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat melalui berbagai media.
2. BPOM membangun *agenda setting* yang diimplikasi oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
3. BPOM memenuhi permintaan informasi dan permohonan wawancara media agar media mendapatkan informasi dari BPOM dengan baik dan menyampaikan kinerja atau pernyataan dari BPOM.
4. BPOM melakukan pertemuan dengan media dan/atau kunjungan ke kantor media untuk menjalin hubungan yang lebih intensif, terutama terkait kerja sama penyampaian dan penyebaran informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat.
5. BPOM melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

3.5.2. IKK 9: Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80	80	100%	405.639	403.757	99,54%

Realisasi indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” tahun 2024 adalah 80% dari target tahun 2024 sebesar 80%, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori ‘Baik’. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 79%, capaian indikator adalah 101,08 % dengan kriteria “Baik” (Hijau). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 237.108.500 dengan realisasi Rp 237.086.264 (99,99%)

Penetapan target tahun ini mengacu pada capaian persentase tahun 2023 lalu, yaitu sebesar 79,5%. **Kenaikan capaian di tahun 2024 ini menunjukkan telah dilakukannya upaya perbaikan dalam menindaklanjuti permohonan wawancara dari media.** Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan Indikator Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%. Pada tahun 2024, BPOM menerima sebanyak 195 (seratus sembilan lima) permohonan wawancara dari media. Permohonan ini diajukan untuk keperluan permintaan



informasi, talkshow, atau konfirmasi dan penjelasan tertulis terkait isu obat dan makanan.

Dari permohonan tersebut, 156 (seratus lima puluh enam) permohonan telah ditindaklanjuti (80%) dengan rincian 32 (dua puluh enam) permohonan terpenuhi melalui wawancara langsung dengan narasumber BPOM, 122 (seratus dua puluh dua) permohonan terpenuhi melalui penyampaian jawaban tertulis, dan 2 (dua) melalui pemenuhan permohonan narasumber untuk talkshow dengan media.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a. Merespons secara cepat permohonan wawancara dari media dengan memberikan jawaban secara tertulis melalui surat atau melalui pesan komunikasi. Terlebih permohonan yang diajukan media tidak selalu memerlukan adanya narasumber dan waktu khusus untuk melakukan wawancara. Seringkali permohonan informasi yang disampaikan hanya berupa pertanyaan singkat untuk mengonfirmasi suatu isu dan memerlukan jawaban yang cepat dari BPOM.
- b. Untuk respons cepat melalui jawaban tertulis yang disampaikan kepada media, BPOM memanfaatkan database hasil jawaban wawancara yang dimiliki oleh Humas BPOM, terutama untuk pertanyaan yang diajukan berulang oleh beberapa media.
- c. Humas BPOM berupaya meningkatkan koordinasi dengan unit teknis untuk dapat melakukan koordinasi cepat dalam menjawab pertanyaan/permohonan informasi yang ditanyakan oleh media, sehingga dapat memangkas waktu pengumpulan data agar jawaban dapat disampaikan kepada media sesuai dengan kebutuhan tenggat waktu media.
- d. Menyebarkan siaran pers/press release, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial, ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik BPOM kepada media untuk dapat menjadi acuan jawaban atas pertanyaan media.

3.5.3. IKK 10: Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	98,6	100	101,42%	2.289.565	2.289.414	99,99%

Realisasi Indikator kinerja “Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting” sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah 100% dari target 98,6%, sehingga capaian indikator adalah 101,42% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Adapun pagu anggaran pada IKK10 adalah sebesar Rp 2.289.565.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.289.414.478,- atau 99,99%

Penyusunan agenda setting publikasi tahun 2024 mengacu pada agenda setting pemerintah yang disusun oleh Kantor Staf Presiden dan mempertimbangkan rencana program serta kegiatan strategis BPOM tahun 2024. Untuk melaksanakan agenda setting tersebut disusun kalender konten setiap bulannya dengan melibatkan tim pelaksana media sosial BPOM. Kalender konten publikasi terdiri dari beberapa pilar konten antara lain konten kinerja, konten pelayanan publik, konten greeting, konten edukasi, dan konten santai/trivia.

Cara perhitungan indikator persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting adalah dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang diunggah di platform media sosial dengan perencanaan dikalikan 100%. Publikasi adalah pengunggahan materi baik berupa foto, infografis, motiongrafis, videografis ke berbagai akun resmi platform media sosial BPOM (Instagram, fanpage Facebook, Youtube, Twitter). Sedangkan agenda setting adalah perencanaan materi publikasi berdasarkan pemetaan isu obat dan makanan yang disusun tahunan, bulanan dan mingguan.

Sampai dengan Triwulan 4 tahun 2024, realisasi publikasi yang telah dilakukan BPOM, yaitu sebanyak 230 publikasi terdiri dari 41 greetings dan 189 publikasi terkait tematik kinerja/ edukasi.

Koordinasi dan kerja sama yang baik di dalam tim pelaksana media sosial BPOM sangat mendukung tercapainya target indikator tersebut. Selain itu adanya brainstorming dengan tim pelaksana media sosial BPOM untuk menyusun kalender konten publikasi setiap bulannya juga menentukan keberhasilan pencapaian target. Pelaksanaan agenda setting yang di amplifikasi oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) dapat meningkatkan paparan informasi publik kepada media dan masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator antara lain:

- a. BPOM menyusun materi komunikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini termasuk laporan, infografis, dan video yang menyoroti pencapaian, kebijakan baru, dan informasi penting lainnya.
- b. BPOM memiliki situs web yang informatif dan mudah dinavigasi yang mencakup informasi terbaru tentang berita, peraturan, dan publikasi kinerja. Selain itu, penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang peran BPOM dan menciptakan dialog langsung dengan publik.

3.6. Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal

SK6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal

IKK 11	Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas
IKK 12	Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Kerja Sama dan Humas

3.6.1. IKK 11: Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	86,32	80,66	93,44%	224.143	224.136	100%

Sasaran Kegiatan ke-6 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal” diwujudkan salah satunya dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang dicapai oleh Biro Kerja Sama dan Humas. Dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Realisasi Indikator kinerja ini pada Tahun 2024 adalah **80,88%** dari target sebesar 86,32%, sehingga capaian indikator adalah **93,44%** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” (Kuning).

Pada tahun 2024, target ini tidak tercapai dan terdapat penurunan yang signifikan yaitu dari **83,97** (2023) ke **80,66** (2024) atau sebanyak 3,31 poin. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat, terdapat 1 (satu) komponen pengungkit, yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Penetapan *roadmap* pelaksanaan reformasi birokrasi harus secara konsisten dilaksanakan dan dipantau penerapannya. Namun, di tahun 2024, hasil penilaian merupakan penilaian yang dilakukan Inspektorat tanpa melakukan *desk* terhadap unit, sehingga dimungkinkan kurangnya pemahaman terhadap data dukung yang diberikan oleh Biro Kerja Sama dan Humas.

Namun, perlu diperhatikan bahwa selama tahun 2024 berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung penerapan RB di 8 (delapan) area tersebut, diantaranya melalui:

- a. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi seluruh area perubahan di lingkup Biro Kerja Sama dan Humas tahun 2024.
- b. Meningkatkan internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kekinian.
- c. Pemeliharaan dan peningkatan Quality Management System.
- d. Pelaksanaan *Sharing Session* berbagai informasi.
- e. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Utama dari hasil LKE tahun sebelumnya sebagai bentuk perbaikan dari tahun sebelumnya.

1) Pemeliharaan dan peningkatan *Quality Management System*

a. Audit Internal QMS ISO 9001:2015

Audit internal merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam rangka penerapan implementasi sistem mutu. Pada audit internal akan diukur sejauh mana SOP dan instruksi kerja yang dijalankan dan mampu mencapai hasil yang diinginkan dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan proses. Dalam rangka memperbaiki kelemahan proses, Biro Kerja Sama dan Humas dituntut selalu melakukan *continuous improvement* dan mengkaji dokumen system mutu/instruksi kerja yang telah diterapkan secara berkala.

Audit internal QMS ISO 9001:2015 tahun 2024 dilakukan oleh auditor internal BPOM pada tanggal 6-7 Juni 2024 dengan hasil 2 AFI (Saran Perbaikan), sebagai berikut:

- i. Terkait dengan pengelolaan SDM, utamanya dalampengembangan kompetensi, sudah dibuat rencan pengembangan kompetensi. Namun rencana tersebut masih bersifat sangat umum dan tidak menysasar pada individu/pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi sesuai dengan gap kompetensi masing-masing.Tidak dibuat pemetaan gap kompetensi dari setiap pegawai, sehingga tidakdik etahui kebutuhan pengembangan kompetensi yang diperlukan. Hal ini tentunya berdampak penting pada kualitas kinerja pegawai dan organisasi pada akhirnya, karena organisasi tidak mampu menjamin kompetensi pegawai telah



KSHM



BADAN POM

2024

sesuai dengan tugas yang diberikan. Hal ini kurang sejalan dengan pelaksanaan ISO 9001:2015 klausul 7.2 terkait kompetensi.

- ii. Dalam SOP Mikro Notifikasike WTO, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pelaku proses bisnis yang dicantumkan (3 pelaku) dan jumlah pelaku yang memiliki aktivitas (2 pelaku). Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasi SOP dan berpotensi menimbulkan risiko operasional.

b. Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015

Untuk mengetahui apakah Sistem manajemen mutu (QMS) sudah berjalan baik sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan terhadap persyaratan tertentu perlu dilakukan audit oleh pihak eksternal.

Audit Eksternal dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015 tahun 2024 dilakukan oleh Tim SUCOFINDO tanggal 28-29 Oktober 2024 dengan menyatakan bahwa tidak diterbitkan temuan baik minor, major maupun observasi. Dengan hasil tersebut, Tim Auditor merekomendasikan kembali terbitnya Sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kerja Sama dan Humas.

c. Internalisasi Reformasi Birokrasi

Internalisasi Reformasi Birokrasi di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan melalui program Agen Perubahan, yakni I Love Monday, Tanding RB, dan Ngobrol Video (NgoVi) sehingga dapat menarik minat para pegawai dan bersifat kekinian dengan topik, kuis, dan reward secara berkala. Pelaksanaan kegiatan internalisasi Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas, dan *core values* BerAKHLAK telah dilaksanakan pada:

1) Pelaksanaan Refreshing Knowledge RB Tematik (5 Juli 2024)

Kegiatan internalisasi berjudul Refreshing Knowledge on RB Tematik dilaksanakan pada 5 Juli 2024. Diikuti seluruh pegawai Biro KSHM

Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka membahas Pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM, yang bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas tata kelola pemerintahan, pengawasan obat dan makanan, serta pelayanan publik yang prima.

Dalam kegiatan ini, dibahas beberapa hal, antara lain:

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPOM

BPOM memiliki peran utama dalam menjamin keamanan, mutu, dan daya saing produk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Untuk mendukung tugas tersebut, BPOM memiliki struktur organisasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

b. Strategi Manajemen Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 164 Tahun 2023, telah dibentuk Tim RB BPOM yang mengelola berbagai program reformasi birokrasi dengan fokus pada:

- Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN.
- Digitalisasi administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.
- Penanganan isu strategis nasional, seperti penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.

c. Capaian Reformasi Birokrasi BPOM

BPOM mencatat peningkatan Indeks RB dari 82,58 menjadi 89,12 pada tahun 2023 melalui dua pendekatan utama:

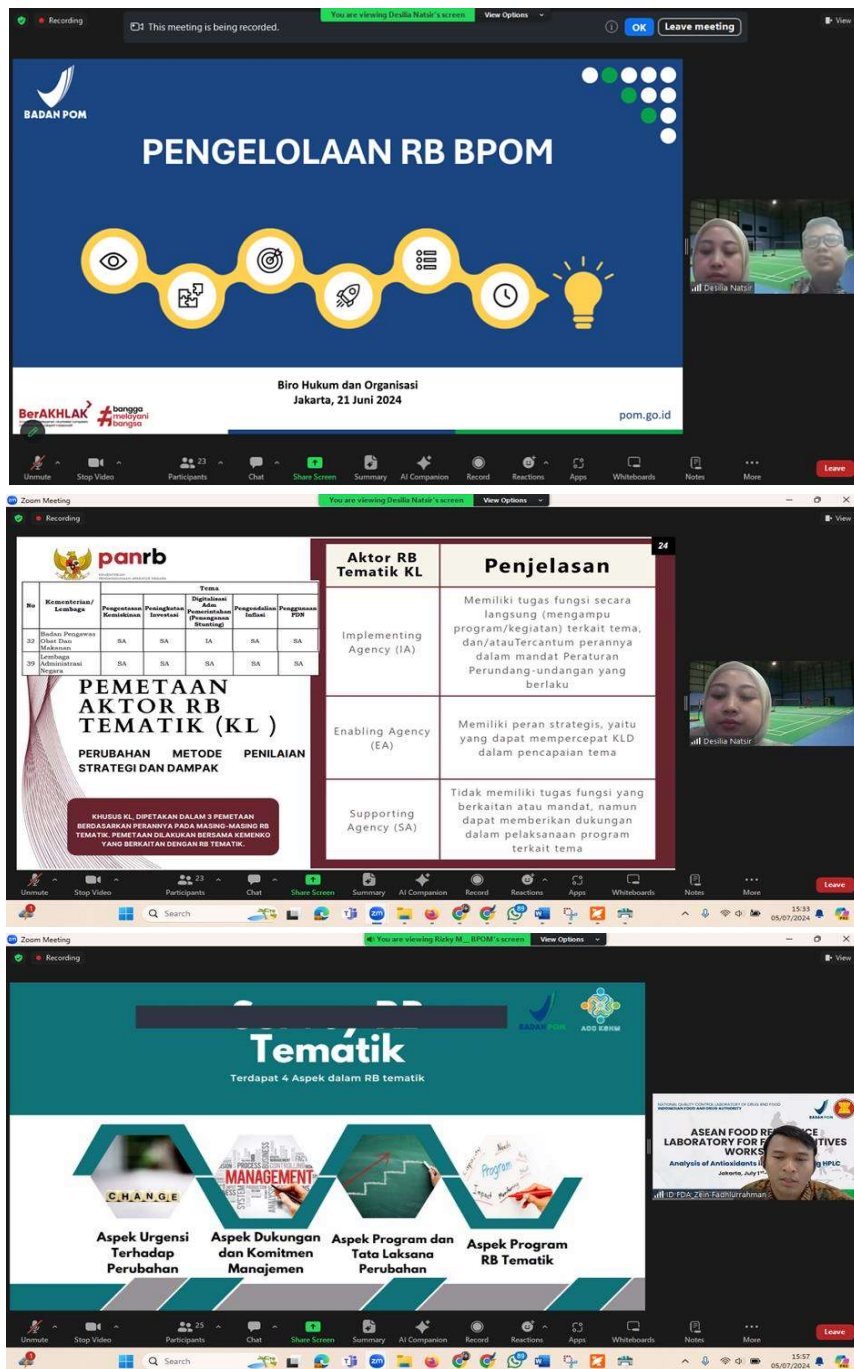
- i. RB General
 - Peningkatan efektivitas kebijakan pengawasan obat dan makanan.
 - Implementasi sistem merit dalam manajemen ASN.
 - Optimalisasi tata kelola dan akuntabilitas layanan publik.
- ii. RB Tematik – Fokus pada lima prioritas utama:
 - Pengentasan Kemiskinan melalui pembinaan UMKM sektor obat dan pangan.
 - Peningkatan Investasi dengan percepatan penerbitan izin edar dan sertifikasi industri.
 - Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam program percepatan penurunan stunting.
 - Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk mendukung industri lokal.
 - Pengendalian Inflasi dengan memastikan kelancaran distribusi obat dan makanan serta stabilisasi harga bahan baku.
- d. Berkaitan dengan pemaparan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi RB BPOM:
 - Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengawasan obat dan makanan.
 - Optimalisasi digitalisasi layanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi reformasi birokrasi.
 - Penguatan sinergi lintas sektor, khususnya dalam implementasi RB Tematik.

Rekomendasi dan tindak lanjut

- e. Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna memperkuat pengawasan serta memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan akan mendukung efektivitas pelaksanaan program reformasi birokrasi di sektor pengawasan obat dan makanan.
- f. Selain itu, optimalisasi monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi (RB) perlu diperkuat agar setiap program yang dijalankan dapat

diukur secara objektif dan memberikan dampak nyata. Evaluasi berkala akan membantu dalam mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif.

- g. Sejalan dengan transformasi digital, BPOM juga perlu memperkuat inovasi dalam digitalisasi layanan publik. Pemanfaatan teknologi yang lebih canggih diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, mempermudah akses bagi masyarakat, serta mempercepat proses administrasi dan pengawasan.



2) Pelaksanaan Tanding RB dan Internalisasi BerAKHLAK (23 Agustus 2024)

Internalisasi RB, ZI dan BerAKHLAK telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 di Aula Merah Putih Lt. 8, BPOM bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan AoC yaitu tanding RB. Tanding RB merupakan kegiatan internalisasi RB, ZI dan BerAKHLAK yang dikemas dalam bentuk interaktif yang menarik dan menyenangkan. Tanding RB ini bertemakan “Semangat Kemerdekaan, Semangat BerAKHLAK” terdiri dari berbagai macam jenis lomba yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Harmonis dan Kolaboratif. Tema kemerdekaan diangkat dalam rangka menyambut HUT RI di bulan Agustus.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro KSHM dan diikuti oleh pegawai Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan hasil survei BerAKHLAK yang dilaksanakan oleh PPSDM dan juga presentasi materi nilai-nilai BerAKHLAK yang dipandu oleh Koordinator Kelompok Kerja Manajemen Perubahan. Para pegawai memberikan respon positif terhadap kegiatan Tanding RB dan internalisasi BerAKHLAK berharap kegiatan serupa dilaksanakan ke depan.





Materi Hasil Survei Core Value BerAKHLAK

Dalam melakukan internalisasi RB, PPSDM mengadakan survey Core Value BerAKHLAK pada bulan Juni 2024. Dengan jumlah responden yang mengisi survei sebanyak 5.096 dari total populasi sebanyak 5.377. Untuk itu *Level of confidence* dari hasil yang disampaikan mencapai 99%. Indeks implementasi BerAKHLAK mencapai angka 61.1% dengan kategori B (Cukup Sehat) dengan nilai tertinggi adalah Berorientasi Pelayanan dan nilai paling rendah adalah Harmonis.

Hasil Survei Core Value BerAKHLAK Unit Biro KSHM dapat dilihat pada table di bawah ini:

No.	Nilai BerAKHLAK	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Keterangan
1.	Berorientasi Pelayanan	58.5%	59.6%	Cukup Sehat
2.	Akuntabel	61.0%	66.0%	Cukup Sehat
3.	Kompeten	61.0%	61.7%	Cukup Sehat
4.	Harmonis	58.5%	38.3%	Tidak Sehat
5.	Loyal	34.1%	36.2%	Tidak Sehat
6.	Adaptif	48.8%	74.5%	Cukup Sehat
7.	Kolaboratif	78.0%	83.0%	Sehat
8.	BerAKHLAK IMPLEMENTATION INDEX	57.1%	59.9%	Cukup Sehat
Jumlah Responden		41	47	

Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh PPSDM di atas, terlihat adanya kontribusi program kerja AoC terhadap peningkatan BerAKHLAK implementation indeks di Biro KSHM. Tahun 2023, hasil survei *core value* BerAKHLAK Biro KSHM sebesar 57.1%. Tahun 2024 meningkat menjadi 59.9%. Adapun perbedaan secara signifikan terlihat pada nilai Adaptif yang meningkat sebesar 25.7%. Namun demikian, Biro KSHM perlu meningkatkan implementasi BerAKHLAK pada nilai Harmonis dan Loyal agar nilai BerAKHLAK di Biro KSHM menjadi semakin baik.



KSHM



BADAN POM

2024

3) Pelaksanaan Ngobrol Bareng Kerja Sama dan Humas (13 Desember 2024)

- a. Kegiatan internalisasi berjudul Ngobras (Ngobrol Bareng Kerja Sama dan Humas) dilaksanakan pada 13 Desember 2024. Kegiatan diikuti seluruh pegawai Biro KSHM di Hotel PORTA by Ambarrukmo, Yogyakarta.
- b. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka membahas hasil opini pegawai Biro KSHM 2024, yang bertujuan untuk evaluasi serta membahas perbaikan employee engagement, organizational commitment dan kesejahteraan pegawai. Selain itu juga membahas hasil evaluasi pembangunan zona integritas dari inspektorat.
- c. Dalam kegiatan ini, dibahas beberapa hal, antara lain:

1) Indeks Employee Engagement Biro KSHM

Employee Engagement adalah Keadaan psikologis individu yang bersifat positif yang ditandai dengan usaha yang kuat secara fisik dan mental dalam bekerja serta perasaan terlibat yang kuat, bangga, dan penuh konsentrasi dalam bekerja. Indeks Employee Engagement terbagi menjadi 3 kategori penilaian yaitu *Actively Disengaged* (menunjukkan sikap buruk dan mempengaruhi orang lain dengan sikap negatifnya), *Not Engaged* (Bekerja seperlunya dan berpotensi keluar dari organisasi), dan *Actively Engaged* (Berkarakteristik loyal, productive dan ingin kontribusi bagi organisasi). Indeks Employee Engagement Biro KSHM termasuk dalam *Actively Engaged* yaitu Berkarakteristik loyal, productive dan ingin kontribusi bagi organisasi.

2) Indeks Organizational Commitment

Organizational commitment adalah intensi atau kesediaan pegawai untuk bertahan dalam organisasi dalam jangka waktu panjang berdasarkan perasaan, prinsip atau nilai yang dianut, maupun manfaat yang didapatkan dari organisasi. Indeks *Organizational Commitment* Biro KSHM termasuk dalam *Moderate Commitment* dan *Actively Engaged*.

3) Indeks Kesejahteraan Pegawai Biro KSHM

Kesejahteraan pegawai adalah Keadaan psikologis individu terkait usaha organisasi dalam memberikan balas jasa berupa materiil dan non-materiil baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan kebijakan sesuai kewenangan organisasi. Indeks kesejahteraan pegawai Biro KSHM pada tahun 2024 mendapatkan nilai 3,08 dengan kategori Baik.

4) Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.11.24.615 Tanggal 28 November 2024 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki nilai total pada sebesar 80,66 dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan menjadi terbawah diantara unit kerja di Pusat.

d. Kesimpulan

- 1) Indeks Employee Engagement Biro KSHM termasuk dalam *Actively Engaged* yaitu Berkarakteristik loyal, productive dan ingin kontribusi bagi organisasi.
- 2) Indeks *Organizational Commitment* Biro KSHM Tahun 2024 termasuk dalam *Moderate Commitment* dan *Actively Engaged*.
- 3) Indeks kesejahteraan pegawai Biro KSHM pada tahun 2024 mendapatkan nilai 3,08 dengan kategori Baik. Pegawai Biro KSHM berkomitmen untuk meningkatkan Indeks kesejahteraan pegawai di tahun 2025.
- 4) Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi Biro KSHM Tahun 2024 mendapatkan nilai 80,66 dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat sehingga pegawai Biro KSHM berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai indeks persepsi RB tahun 2025.

DOKUMENTASI





Pagu kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas, yaitu sebesar Rp. 224.143.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 224.136.017,- (100%).

Pada tahun selanjutnya, Biro Kerja Sama dan Humas akan menindaklanjuti masukan dan rekomendasi dari Inspektorat serta melakukan perhitungan mandiri terkait usulan target indikator, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020-2024.

3.6.2. IKK 12: Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Sama dan Humas	96,41	98,98	102,47%	44.828	44.827	100%

Realisasi Indikator kinerja “**Nilai Pengelolaan Kearsipan**” Biro Kerja Sama dan Humas Tahun 2024 adalah 98,98 dari target Tahun 2024 sebesar 96,41, sehingga capaian indikator adalah **102,47%** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 44.828.700 dengan realisasi Rp 44.827.203 (100%).

Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 telah dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan Juli 2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum Nomor B-KA.03.25.01.24.84, tanggal 29 Januari 2024.

Penentuan target nilai kearsipan pada masing-masing unit kerja mengacu pada Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 tentang Direktif Penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, yaitu:

Berdasarkan Target indikator kinerja kearsipan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan TW III tahun 2023, dengan hasil reuiu apabila capaian kinerja tahun 2022 lebih besar dari pada TW III tahun 2023 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2022 dan apabila capaian kinerja TW III tahun



2023 lebih besar dari pada tahun 2022 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2023;

Realisasi capaian kinerja tersebut dijadikan target Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 di masing-masing Unit Kerja;

Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapatkan dari Laporan hasil pengawasan kearsipan internal di unit kerja di lingkungan BPOM yang dilakukan sepanjang tahun.

Secara garis besar, perolehan hasil pengawasan unit kerja di Lingkungan BPOM dibagi ke dalam kategori sebagai berikut:

- Kategori Sangat Memuaskan (AA) dengan nilai >90-100
- Kategori Memuaskan (A) dengan nilai >80-90
- Kategori Sangat Baik (BB) dengan nilai >70-80
- Kategori B (Baik) dengan nilai 60-70
- Kategori CC (Cukup) dengan nilai >50-60
- Kategori C (Kurang) dengan nilai >30-50
- Kategori D (Sangat Kurang) dengan nilai >0-30

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dari Biro Umum, Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Kerja Sama dan Humas Tahun 2024, diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan capaian nilai dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023, Biro Kerja Sama dan Humas mendapatkan nilai 96,41 sedangkan di tahun 2024 sebesar 98,98, sehingga terdapat peningkatan sebesar **2,57 poin**.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas untuk mencapai realisasi indikator tersebut antara lain:

1. Melaksanakan kepatuhan terhadap implementasi kebijakan kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, SKKAD dan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan secara tepat waktu;
2. Terlaksananya penyelenggaraan kearsipan (pengelolaan arsip dinamis) sesuai ketentuan dan tepat waktu;
3. Menyelenggarakan penyelamatan arsip bernilai guna permanen sesuai ketentuan dan tepat waktu.

3.7. Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal

SK7. Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal

IKK 13 Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas

3.7.1. IKK 13: Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	85,2	83,82	98,32%	243.557	243.543	99,99%

Realisasi Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas” pada Tahun 2024 adalah 83,82% dari target sebesar 85,2%, sehingga capaian indikator adalah 98,32% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning).

Sehubungan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.
- b. Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas tahun 2024 belum memenuhi target. Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN Tahun 2024 *cut off*

data per 31 Desember 2024, diperoleh hasil nilai IP ASN BPOM Tahun 2024 sebesar 86.98. Data IPASN BPOM Tahun 2024 sebagaimana pada lampiran. Sebagai informasi nilai IP ASN BPOM Tahun 2023 adalah 89.99. terdapat penurunan nilai IP ASN sebesar 3,01, hal ini dipengaruhi dengan perubahan pengukuran IP ASN tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, pada tahun 2024, hasil realisasi dari indikator ini **dikecualikan** dalam perhitungan NPSS unit kerja, mengingat perubahan pengukuran terjadi saat tahun berjalan, dan target sudah tidak dapat disesuaikan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator IP ASN di Biro Kerja Sama dan Humas antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Kursus Bahasa Korea, Pelatihan Manajemen Risiko, dll.
2. Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: e-Learning Pejabat Pembuat Komitmen, Sosialisasi Kearsipan, Bimbingan Teknis JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
3. Penyelenggaraan Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM).
4. Penyelenggaraan *Team Building* Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
5. Seminar *Capacity Building*, dll.
6. Peningkatan kompetensi pegawai menggunakan aplikasi IDEAS.

Pengembangan kompetensi pegawai sangat diperlukan dalam sebuah organisasi karena dengan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya. Biro Kerja Sama dan Humas secara konsisten terus berkomitmen dengan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen kepegawaian serta secara konsisten mendukung pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPOM guna peningkatan kinerja organisasi.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas pegawai antara lain memberikan penugasan kepada jabatan pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya minimal 20 JP.

Kegiatan-kegiatan di atas diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Humas. Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp243.557.000,- (100%) dari alokasi anggaran Rp243.543.313,-.



KSHM



BADAN POM

2024

Dokumentasi





3.8. Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas

SK8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas

IKK 14 | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas

3.8.1 IKK 14: Indeks pengelolaan data dan informasi

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Indeks pengelolaan data dan informasi	3	3	120%	21.220	21.203	99,92%



K S H M



BADAN POM

2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas							

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah **3** dari target Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah **120%** dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Target triwulanan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan indeks pengelolaan data dan informasi Sektama tetap optimal sepanjang tahun. **Sebagai catatan, mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, untuk realisasi yang mencapai target maksimal, maka dapat dikonversi capaiannya menjadi 120%.**

Penilaian capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Yang Optimal dihitung secara kumulatif dari Januari hingga Desember sehingga upaya perolehan nilai seharusnya dilakukan sejak awal tahun berjalan.

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas pada tahun 2024 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Pemanfaatan *e-mail corporate* BPOM;
- b. Pemutakhiran data di BPOM *Command Center* (BOC);
- c. Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Kepala Biro Kerja Sama dan Humas.

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp. 21.203.543,- (99,92%) dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 21.220.000,-

Capaian indikator ini sudah melampaui target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pegawai Biro Kerja Sama dan Humas telah memanfaatkan secara optimal *email corporate* - pom.go.id
- b. Biro Kerja Sama dan Humas rutin memverifikasi data pada BOC;

- c. Biro Kerja Sama dan Humas rutin memanfaatkan data pada BOC;
- d. Membuat infografis secara rutin untuk mengingatkan pegawai dan disebarakan melalui *whatsapp group* Biro.

3.9. Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel

SK9. Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel

IKK 15 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

3.9.1. IKK 15: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Volume			Anggaran per IKK (dalam ribuan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Target	Realisasi
a	b	c	d	a	b	c	d
Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100 (efisien)	100 (efisien)	120%	17.259	17.220	99,78%

Realisasi Indikator kinerja “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah **100** dari target Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1000, sehingga capaian indikator adalah **120%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (Hijau)**. **Sebagai catatan**, mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, untuk realisasi yang mencapai target maksimal, maka dapat dikonversi capaiannya menjadi 120%.

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan range, yaitu **0 - 0,2: 100% (Efisien); 0,21 - 0,4: 95% (Efisien); 0,41 - 0,6: 92% (Efisien); 0,61 - 0,8: 90% (Efisien); 0,81 - 1,0: 88% (Efisien); 1,01 - 1,2: 86% (Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84%**

(Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8: 78% (Tidak Efisien); > 1,81 dan <0: 75% (Tidak Efisien).

Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Biro Kerja Sama dan Humas, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Tabel hasil perhitungan menunjukkan bahwa Tingkat Efektifitas penggunaan anggaran sebesar **0,00** sehingga apabila dikonversikan menjadi capaian masuk pada kategori **Efisien** dengan nilai **100**.
- b. Seluruh indikator kinerja kegiatan sudah efisien, terlihat dari realisasi indikator maupun anggaran yang seluruhnya hampir mencapai nilai 100%.

Mempertimbangkan hal di atas, beberapa upaya yang akan terus dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Humas untuk mempertahankan capaian indikator di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan yang dilakukan per triwulan dan disesuaikan dengan perencanaan;
2. Percepatan proses pertanggungjawaban keuangan;
3. Percepatan kegiatan sesuai dengan *Plan of Action*;
4. Melakukan evaluasi dan perbaikan untuk indikator yang belum tercapai targetnya di tahun 2024 agar tidak terulang di tahun 2025.
5. Memberikan pemahaman terkait target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 agar dapat menentukan strategi pencapaiannya kepada seluruh pegawai.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan tugas koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa fokus kepada dukungan visi dan misi BPOM serta penerapan *core value* ASN dan budaya organisasi PIKKIR.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan sasaran, indikator serta target kinerja yang terdiri dari 9 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan. Secara umum, pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendapatkan NPSS sebesar **104,74%** dengan kriteria “Baik”. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum tercapai, sehingga harus dilakukan perbaikan di tahun selanjutnya.

4.2. Saran

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus meningkatkan kinerja serta pelayanan dukungan manajemen BPOM. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat antara lain:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan yang SMART dan *applicable*;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi, dan digital dalam memberikan pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis teknologi;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
5. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi pegawai secara rutin/berkelanjutan dan mendokumentasikan proses pemberian *reward* dan *punishment* dengan tertib; dan
6. Peningkatan kompetensi SDM yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.